

MEDIAKEUANGAN

T R A N S P A R A N S I I N F O R M A S I K E B I J A K A N F I S K A L

PERKAYA SUGUHAN, DULANG WISATAWAN

Sektor pariwisata jadi lokomotif andalan baru dalam menggerakkan ekonomi negeri. Pemerintah tengah bersungguh-sungguh menggarap pariwisata sebagai lumbung devisa. Potensi wisata pun dioptimalkan, guna memperkuat daya pikat.



Daftar Isi



Pemerintah tengah serius mengoptimalkan sektor pariwisata sebagai penghasil utama devisa. Daya tarik pariwisata kami gambarkan dengan objek segelas minuman segar nan menggoda yang mampu mengundang minat wisatawan untuk datang berkunjung.

MEDIA KEUANGAN adalah majalah resmi Kementerian Keuangan. Memberikan informasi terkini seputar kebijakan fiskal didukung oleh narasumber penting dan kredibel di bidangnya.

MEDIA KEUANGAN saat ini dapat diunduh melalui



App Store



Google Play



Diterbitkan oleh: Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan. **Pelindung:** Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. **Pengarah:** Wakil Menteri Keuangan Mardiasmo. **Penanggung Jawab:** Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan Hadiyanto. **Pemimpin Umum:** Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Nufransa Wira Sakti. **Pemimpin Redaksi:** Kabag Manajemen Publikasi, Rahmat Widiana. **Redaktur Pelaksana:** Yani Kurnia A. **Dewan Redaksi:** Ferry Gunawan, Dianita Sulastuti, Titi Susanti, Budi Sulistyio, Pilar Wiratoma, Purwo Widiarto, Muchamad Maltazam, Sri Moeji S, Alit Ayu Meinarsari, Teguh Warsito, Hadi Surono, Ali Ridho, Budi Prayitno, Budi Sulistyio. **Tim Redaksi:** Farida Rosadi, Reni Saptati D.I., Danik Setyowati, Abdul Aziz, Dara Haspramudilla, Rostamaji, Adik Tejo Waskito, Arif Nur Rokhman, Ferdian Jati Permana, Andi Abdurrochim, Muhammad Fabhi Riendi, Leila Rizki Niwanda, Kurnia Fitri Anidya, Buana Budianto Putri, Muhammad Irfan, Arimbi Putri, Nur Iman, Berliana, Hega Susilo, Ika Luthfi Alzuhri, Agus Tri Hananto, Irfan Bayu. **Redaktur Foto:** Anas Nur Huda, Resha Aditya Pratama, Fransiscus Edy Santoso, Andi Al Hakim, Muhammad Fath Kathin, Arief Kuswanadji, Intan Nur Shabrina, Ichsan Atmaja, Megan Nandia, Sugeng Wistriono, Rezky Ramadhani, Arif Taufiq Nugroho. **Desain Grafis dan Layout:** Venggi Obdi Ovisa, Dimach Oktaviansyah Karunia Putra, A. Wirananda, Victorianus M.I. Bimo. **Alamat Redaksi:** Gedung Djuanda 1 Lantai 9, Jl. Dr. Wahidin Raya No. 1, Jakarta Telp: (021) 3849605, 3449230 pst. 6328/6330. **E-mail:** mediakeuangan@kemenkeu.go.id.

Redaksi menerima kontribusi tulisan dan artikel yang sesuai dengan misi penerbitan. Redaksi berhak mengubah isi tulisan tanpa mengubah maksud dan substansi. Bagi tulisan atau artikel yang dimuat akan mendapatkan imbalan sepiantasnya.

5 DARI LAPANGAN BANTENG

6 EKSPOSUR

10 LINTAS PERISTIWA

14 TOPIK PILIHAN

15 TAGAR

LAPORAN UTAMA

17 Agar Pariwisata Indonesia Lebih Mempesona

20 Infografik

22 Gairah Pemerintah Olah Pariwisata

25 Meramu Pesona Wisata Prioritas

27 Kala Pariwisata dan Kreativitas Berpadu

TRIVIA

29 Tahukah Kamu?

WAWANCARA

30 Miliki Hunian Bukan Impian

FIGUR

34 Bekerja dengan Hati, Berinovasi Tiada Henti

OPINI

37 Bangun GRC, Cegah Korupsi

OPINI

40 Manuver Kebijakan Pajak

POTRET KANTOR

42 Mengabdikan Dari Batas Negeri

PROFESI

44 Bermula Malu Berujung Ulung

REGULASI

46 Wujudkan SDM Unggul, Tarif Cukai Hasil Tembakau Naik

GENERASI EMAS

48 Hilirisasi Teknologi Hadirkan Solusi

BUGAR

51 Jangan Remehkan Stunting

RENUNGAN

52 Belajar ke Seoul

BUKU

53 Asah Kreativitas dengan Mengelola Rutinitas

LOKAL

54 Wisata Naik Tangga di Ngarai Sianok

FINANSIAL

56 Bisnis Bareng Teman

NGOBROL BARENG KEMENKEU CORPU, PASTI SERU!

Cuma di Podcast KEMENKEU CORPU LEARNING ON AIR (ECLAIR) kalian bisa belajar keuangan negara dan berbagai hal kapan saja di mana saja.

SAMBIL KERJA ATAU SANTAI, MENGAPA TIDAK?

Dengarkan Eclair melalui:



ECLAIR
KEMENKEU CORPU LEARNING ON AIR

Pariwisata, Lokomotif Andalan Sektor Ekonomi

Kondisi perekonomian global yang tengah tidak menentu dan cenderung melambat justru memberikan angin segar bagi dunia pariwisata di Indonesia. Guna dapat bertahan dalam guncangan ekonomi global, pemerintah terus bertekad untuk meningkatkan ekspor dan mendatangkan investasi ke Indonesia, yang salah satunya dari sektor pariwisata.

Industri pariwisata menjadi sektor andalan dalam mendatangkan wisatawan luar negeri untuk menambah devisa negara. Tidak hanya itu, sektor pariwisata diharapkan juga dapat menarik investor luar negeri untuk menanamkan modalnya di Indonesia melalui *supply chain* penunjang pariwisata.

Untuk itu, pemerintah RI memutuskan untuk melakukan percepatan penyelesaian lima destinasi pariwisata super prioritas, yaitu pengembangan destinasi wisata Danau Toba, Borobudur, Labuan Bajo, Mandalika, dan Likupang. Selain kawasan tersebut, pemerintah juga telah mengalokasikan dana pada APBN 2020 untuk pembangunan amenitas kawasan pariwisata di 186 daerah serta pembangunan atraksi daya tarik wisata di 306 daerah.

Terlepas dari tugas utama yang berada di pundak Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, industri pariwisata tidak bisa digarap hanya oleh kementerian tersebut. Sebagai



contoh adalah obyek wisata di Labuan Bajo. Diperlukan koordinasi dan sinergi pelayanan dari semua pihak mulai dari kedatangan wisatawan di bandara (Kementerian Perhubungan), perjalanan menuju ke hotel (Kementerian Pekerjaan Umum), kunjungan ke obyek wisata (Kementerian Pariwisata), makan dan minum (Pemerintah Daerah), koneksi internet (Kementerian Komunikasi dan Informasi), faktor keamanan (Polri/Pemda) dan masih banyak faktor lain yang mempengaruhi kenyamanan wisatawan. Dan tentu saja yang tidak kalah pentingnya adalah keramahan, kesopanan, dan keakraban dari penduduk di destinasi wisata sehingga memberikan kesan yang mendalam bagi wisatawan dan dapat menggugah rasa untuk datang kembali.

Faktor-faktor tersebut harus dapat

diidentifikasi oleh kita semua bangsa Indonesia. Tidak bisa pemerintah bekerja sendirian untuk meningkatkan pariwisata Indonesia. Contoh sederhana peran serta masyarakat adalah dengan tidak membuang sampah sembarangan. Tentu kita ingat, beberapa waktu yang lalu ada pemberitaan internasional yang menginformasikan tentang menumpuknya sampah di Pantai Kuta Bali dan juga ditemukannya lima kg lebih sampah plastik pada perut ikan paus yang mati di kawasan wisata Wakatobi.

Alokasi anggaran untuk atraksi daya tarik wisata dan pembangunan infrastruktur kawasan pariwisata hanya dapat sukses mendulang devisa apabila ditunjang perilaku dan kesadaran masyarakat Indonesia sebagai tuan rumah bagi wisatawan. Tingkat kesadaran penduduk akan pentingnya menjaga kebersihan, kenyamanan, dan keamanan menjadi faktor penentu dari kedatangan para wisatawan. Alokasi anggaran pemerintah RI untuk pariwisata tidak boleh menjadi sia-sia hanya karena perilaku tidak layak dari masyarakat kita sendiri.

Nufransa Wira Sakti,
Kepala Biro Komunikasi dan
Layanan Informasi

KM.4

Kemenkeu Mengajar (KM) merupakan sebuah kegiatan mengajar selama satu hari di Sekolah Dasar. Kegiatan yang sudah berjalan selama empat tahun ini dilaksanakan serentak di seluruh Indonesia dan melibatkan para pejabat dan pegawai Kemenkeu sebagai relawan. Mereka mengajarkan bagaimana peran Kemenkeu dalam upaya menjaga ekonomi negeri dan memperkenalkan profesi yang ada di Kemenkeu.

Foto
Irfan Bayu P.



WISATA KOLAM RAJA

Tamansari memiliki arti taman yang indah. Taman bersejarah ini dibangun pada masa pemerintahan Sultan Hamengku Buwono I, yaitu dari tahun 1758 sampai 1765. Tempat yang kini dijadikan salah satu destinasi favorit kota Yogyakarta ini dahulu merupakan kolam pemandian Sultan dan keluarganya. Arsitektur ala Portugis-Jawa menjadi daya tarik utama taman ini. Meski kondisi bangunan tak lagi utuh. Tak ayal, wisatawan ramai mengunjungi situs bangunan nan menawan ini.

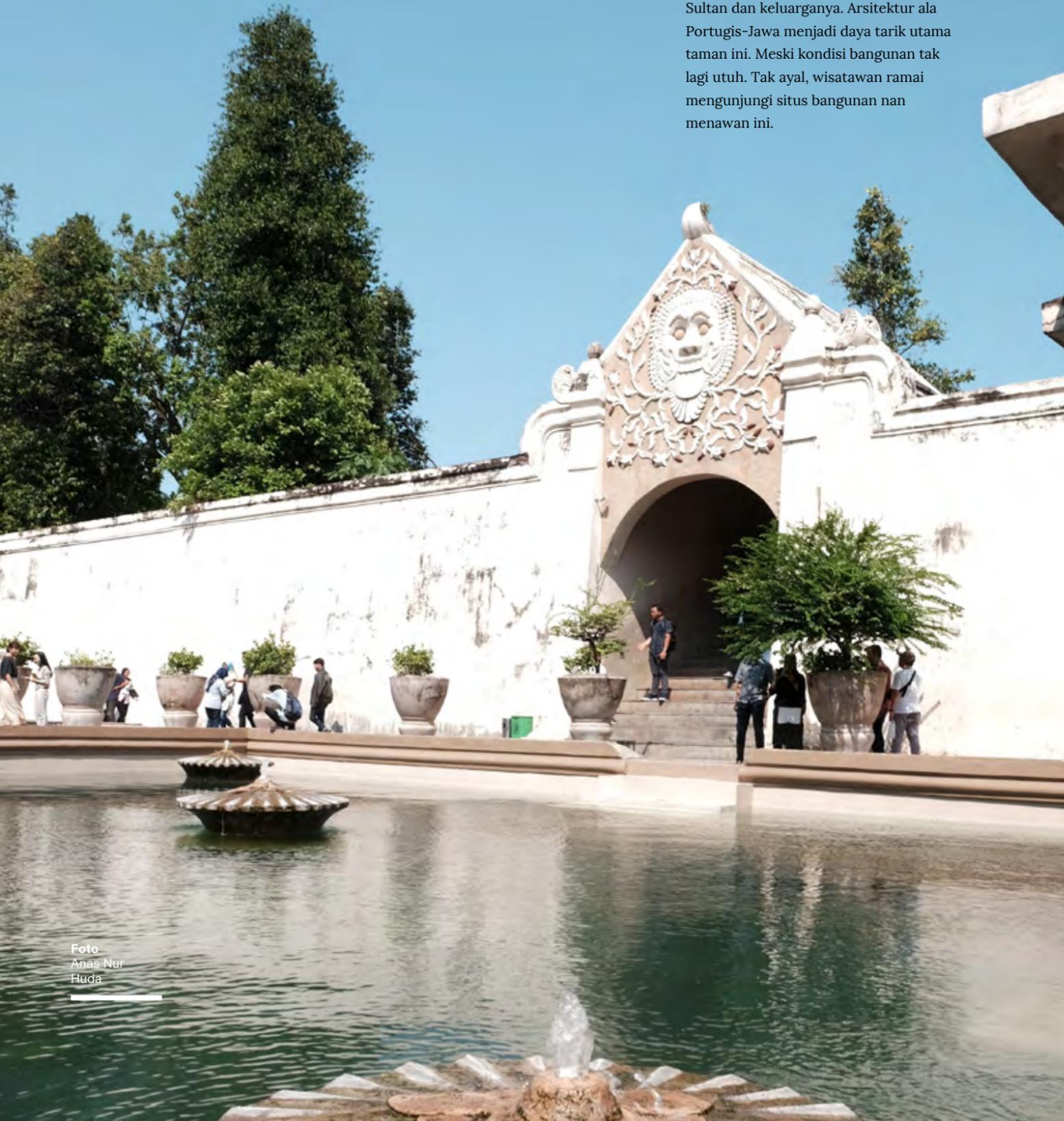
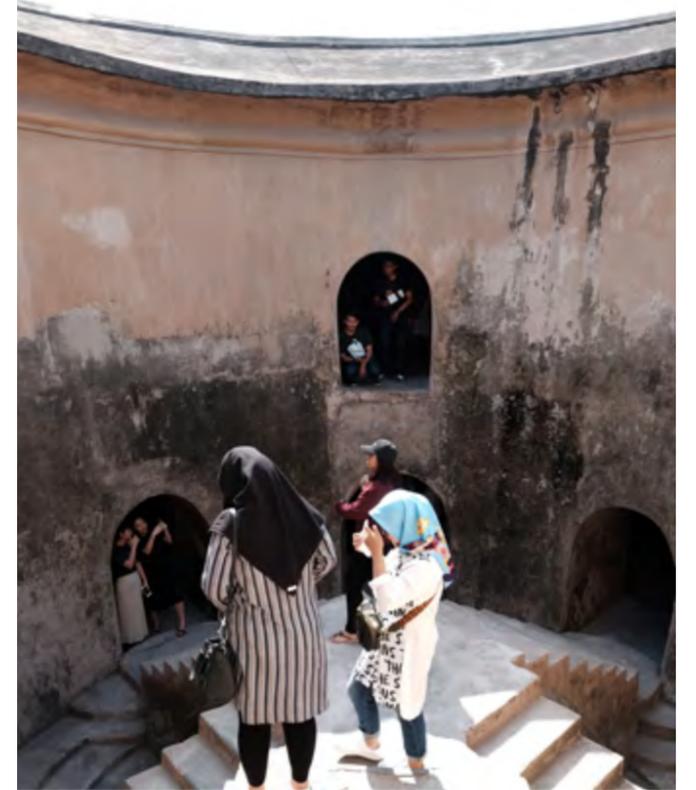


Foto
Anas Nur
Huda





14/11 DIPA dan TKDD Tahun 2020 Telah Diserahkan

Teks
Biro KLI

Foto
Biro KLI

Presiden Joko Widodo didampingi Wakil Presiden (Wapres) Ma'ruf Amin dan Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyerahkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2020 ke seluruh kementerian dan lembaga (K/L), serta Rincian Alokasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) kepada Pemerintah Daerah (Pemda) di Istana Negara pada Kamis, (14/11).

Presiden menyampaikan bahwa untuk pendanaan pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan tahun 2020, Belanja Negara direncanakan mencapai Rp2.540,4 triliun. Dari jumlah tersebut, sebesar Rp909,6 triliun akan dialokasikan kepada 87 kementerian/ lembaga dan anggaran sebesar Rp856,9 triliun akan dialokasikan untuk TKDD. Presiden menginginkan agar belanja segera direalisasikan sejak awal tahun untuk mendorong percepatan pembangunan. "Mulai secepat-cepatnya belanja terutama belanja modal dari DIPA yang sudah diserahkan. Belanja APBN kita ini bisa *trigger* pertumbuhan ekonomi seawal mungkin.

Oleh sebab itu, segera ini dilakukan lelang, pelaksanaan Januari sudah dilaksanakan, jangan *nunggu-nunggu*, ini perintah," jelas Presiden.

Sejalan dengan arahan Presiden, Menkeu dalam paparannya menekankan kondisi global akan mempengaruhi perekonomian Indonesia, khususnya kegiatan ekonomi di beberapa sektor riil di Indonesia yang sudah mengalami perlambatan. Hal ini terlihat dari penerimaan perpajakan dari korporasi yang mengalami pelemahan. "Laju pertumbuhan yang lemah ini harus bisa kita hadapi dan netralisasi salah satunya yang menjadi instrumen paling penting adalah APBN sebagai instrumen fiskal dan sekaligus instrumen untuk melakukan *counter cyclical* terhadap pelemahan. APBN dapat berfungsi sebagai stimulus untuk terus mendorong belanja negara yang efektif, inklusif, terukur dan memiliki dampak langsung kepada masyarakat dan ekonomi, baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah," ucap Menkeu.

25/10

Teks
Biro KLI

Foto
Biro KLI



Pelantikan Wamenkeu Kabinet Indonesia Maju

Presiden Joko Widodo menunjuk Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan (BKF Kemenkeu) Suahasil Nazara menjadi Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) mendampingi Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati yang sebelumnya dijabat Mardiasmo pada acara serah terima jabatan Wamenkeu di Aula Mezzanine Gedung Djuanda I Kemenkeu Jum'at (25/10). Menkeu berharap Wamenkeu yang baru menghasilkan sesuatu komplementaritas yang tetap bisa dilakukan dengan kualitas terbaik sama seperti Mardiasmo yang selama melaksanakan tugas-tugasnya dengan kualitas premium. "Ini adalah bagian dari suatu tradisi, transisi serah terima jabatan yang sangat baik. Saya mengenal Pak Mardiasmo sangat lama dan memang dalam perjalanan karir tersebut menggambarkan karakter dari Pak Mardiasmo seorang yang tekun, seorang yang teliti, dan seorang yang menjalankan tugasnya dengan sungguh-sungguh," ujar Menkeu.



29/10

Teks
Biro KLI

Foto
Biro KLI

Menkeu Optimis Pegawai Bisa Mentransformasi Ide Menjadi Aksi

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati optimistis bahwa jajaran Kementerian Keuangan, khususnya pegawai milenial bisa mentransformasi ide menjadi aksi terutama dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Hal ini disampaikan Menkeu dalam acara Festival Transformasi 2019 Kemenkeu dengan tema "Bincang Kebangsaan 2019: Karya Nyata Untuk Indonesia" di Aula Dhanapala, Kemenkeu pada Selasa (29/10). "Salah satu ciri generasi muda adalah identik dengan mereka yang selalu melakukan *action* (tindakan) dari ide. Ketika kita membicarakan transformasi (ide) maka jadikanlah transformasi itu suatu kebutuhan," ungkap Menkeu. Menkeu berharap bahwa transformasi ide ini juga sejalan dengan perubahan teknologi. Jajaran Kementerian Keuangan harus memiliki *mindset* (pola pikir) bahwa teknologi akan membantu kita untuk bisa beradaptasi dan menciptakan perubahan.

30/10

Teks
Biro KLI

Foto
Biro KLI

Peringatan Hari Oeang Ke-73

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menyelenggarakan Upacara Peringatan Hari Oeang Republik Indonesia ke-73 sekaligus Hari Sumpah Pemuda ke-91 di lingkungan Kantor Pusat Kemenkeu dengan pembina upacara Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati pada Rabu, (30/10). "Kita harus mampu menggunakan keuangan negara dalam menggerakkan ekonomi Indonesia agar semakin berkeadilan, semakin inklusif dan kesejahteraan yang semakin merata. Oleh karena itu, saya ingin mengajak pada perayaan Hari Oeang ke-73 dan dalam semangat Sumpah Pemuda agar kita selalu bekerja dalam semangat seperti pemuda tahun 1928 memiliki visi jangka panjang bahkan sebelum itu," ujar Menkeu. Menkeu mengatakan Indonesia memiliki visi untuk mencapai merayakan kemerdekaan tahun 2045 sebagai negara berpendapatan tinggi, memiliki kesejahteraan yang merata. Ini bukanlah visi yang tidak bisa diraih.





31/10

Teks
Biro KLI

Foto
Biro Umum

Kemenkeu Tempatkan Lulusan STAN di 32 K/L

Sekretaris Jenderal (Sesjen) Hadiyanto menandatangani Nota Kesepahaman penempatan lulusan Politeknik Keuangan Negara (PKN) STAN di 32 Kementerian/Lembaga (K/L). Nota Kesepahaman ini merupakan wujud komitmen bersama Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dan 32 K/L untuk memperkuat pengelolaan keuangan negara. Kami menempatkan lulusan PKN STAN bukan tanpa evaluasi. “Kami selalu melakukan evaluasi dengan atasan. Evaluasi dan juga monitoring terhadap kinerja lulusan PKN STAN di K/L ini cukup baik dengan rata-rata kepuasan kinerja atasan langsungnya berada pada nilai 4 dari skala 5,” ungkap Sesjen saat penandatanganan nota kesepahaman bertempat di Aula Mezzanine pada Kamis (31/10). Pada tahun 2019 ini, Kemenkeu kembali mengalokasikan lulusan program Diploma I Kebendaharaan Negara, Diploma III Manajemen Aset, dan Diploma III Akuntansi sebanyak 622 orang lulusan pada 32 K/L, baik pada unit kerja pusat maupun unit pelaksana teknis.

01/11

Teks
Biro KLI

Foto
Biro KLI



Pesan Menkeu Kepada Dirjen Pajak Baru

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati melantik Suryo Utomo sebagai Direktur Jenderal Pajak (Dirjen Pajak) menggantikan Robert Pakpahan yang memasuki masa pensiun pada Jumat, (01/11) di aula Djuanda gedung Juanda 1, Kementerian Keuangan, Jakarta. Menkeu berpesan kepada Dirjen Pajak yang baru bahwa tugas dan tanggung jawabnya sangat berat karena 70 persen penerimaan APBN berasal dari penerimaan pajak. “Perjalanan karir Bapak, saya anggap sangat lengkap untuk bisa menyiapkan diri dalam posisi sebagai Dirjen pajak yang dipercayai oleh bapak Presiden untuk bisa menjalankan tugas ini,” kata Menkeu. Menkeu menambahkan, terdapat empat kriteria yang harus dimiliki oleh Dirjen Pajak yaitu kompetensi, keikhlasan, dan senang melayani, memiliki keahlian dan berintegritas. Ini adalah fondasi untuk membangun Indonesia maju.

14/11

Teks
Biro KLI

Foto
Biro KLI



Pesan Wamenkeu Untuk Menjadi Manajer Aset yang Unggul

Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu), Suahasil Nazara menyampaikan dua pesan untuk menjadi manajer aset yang unggul (*distinguished asset manager*) dalam seminar internasional Pekan Kekayaan Negara 2019 yang diadakan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) di Hotel Borobudur, Jakarta pada Kamis (14/11). Pertama adalah kebijakan dalam *asset recycling* yang akan dibuat oleh seorang manajer aset harus sesuai dengan tata kelola pemerintahan yang baik. “Dalam seluruh proses membuat peraturan (dalam *asset recycling*) tersebut, kita harus memperhatikan dua dimensi yang sangat penting. Pertama adalah kebijakan-kebijakan tersebut harus sesuai dengan peraturan dan tata kelola yang baik,” ungkap Wamenkeu dalam seminar internasional yang bertemakan *Asset Recycling to Optimize State Assets*. Yang kedua adalah perlunya melihat penelitian dan bukti yang sudah diterapkan di negara lain dengan memperhatikan skema *asset recycle* mana yang bermanfaat.

18/11

Teks
Biro KLI

Foto
Biro KLI

Kuartal Ke-3 2019, Ekonomi Indonesia Tumbuh di Atas Rata-Rata

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyampaikan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia tumbuh di atas rata-rata pertumbuhan ekonomi global. Hal ini disampaikannya dalam acara Konferensi Pers APBN KiTa (Kinerja dan Fakta) di Aula Mezzanine Kementerian Keuangan, Jakarta pada Senin (18/11). “Secara kumulatif, kalau kita lihat baik dari segi *equity* maupun *bonds*, Indonesia dalam posisi *outstanding* dibandingkan negara-negara *emerging* lainnya. Inilah yang mendorong neraca pembayaran sehingga pertumbuhan Indonesia pada Q-3 (kuartal ketiga) tahun 2019 tumbuh 5,02%,” kata Menkeu. Melihat perkembangan isu global sepanjang tahun 2019, gejala ekonomi dan geopolitik terus membayangi pertumbuhan ekonomi global dan pertumbuhan volume perdagangan global.



15/11

Teks
Biro KLI

Foto
Biro KLI

Apresiasi Gerakan Kemenkeu Mengajar

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati dan Museum Rekor Indonesia (MURI) mengapresiasi gerakan sukarela Kemenkeu Mengajar yang sudah memasuki tahun ke-4 pada tahun 2019 ini. Kemenkeu Mengajar 4 telah dilaksanakan secara serentak pada hari Senin, (04/11) yang lalu. “Terlihat dari wajah Anda semuanya adalah kecintaan untuk melakukan sesuatu yang sifatnya sukarela. Itu adalah energi yang harus kita ciptakan, kita gulirkan,” ucap Menkeu pada acara Malam Apresiasi Kemenkeu Mengajar 4 di Aula Mezzanine Gedung Djuanda I Kemenkeu pada Jum’at (15/11). Kemenkeu juga menerima penghargaan Rekor Dunia dari Museum Rekor Dunia Indonesia (MURI) sebagai Program Kerelawanan Aparatur Sipil Negara (ASN) Pertama di Bidang Pengembangan Karakter untuk Siswa Sekolah Dasar di Indonesia melalui Kemenkeu Mengajar.



Optimisme Ekonomi Tumbuh Tinggi

Teks Reni Saptati D. I

Isu pertumbuhan ekonomi kembali menjadi sorotan masyarakat sejak awal November, dipicu rilis BPS terkait pertumbuhan ekonomi dan rapat terbatas sejumlah menteri ekonomi untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui 15 prioritas (*quick wins*). Pertumbuhan ekonomi kuartal III/2019 yang dirilis BPS mencatatkan angka 5,02 persen yoy atau tumbuh lebih lambat dibandingkan tahun lalu yang mencapai 5,17 persen. Dari data BPS, terlihat bahwa sektor industri dan pertanian menjadi penekan laju pertumbuhan pada kuartal ketiga tahun ini.

Sejumlah lembaga memprediksi pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2019 dan tahun-tahun berikutnya. International Monetary Fund (IMF) memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun ini mencapai 5 persen, dan diramal merangkak naik pada tahun depan di level 5,1 persen dan terus naik hingga mencapai 5,3 persen pada 2024. Organization for Economic Cooperation and Development (OECD) memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia hanya sebesar 5 persen untuk tahun ini dan tahun depan. Sementara itu, Asian Development Bank (ADB)

memperkirakan ekonomi Indonesia tahun 2019 tumbuh pada angka 5,1 persen dan tahun 2020 pada angka 5,2 persen.

Beberapa prediksi menampakan angka lebih rendah dibanding perkiraan pemerintah yang optimistis pertumbuhan tahun depan mampu di atas 5,1 persen. Untuk mencapai angka tersebut, Menteri Keuangan telah menyampaikan beberapa langkah yang akan dilakukan untuk mendorong ekonomi tetap tumbuh.

Pertama, menjaga konsumsi dan daya beli rumah tangga dengan stabilitas pasokan dan harga. Kedua, mendorong investasi dengan insentif fiskal, dan partisipasi swasta. Ketiga, mendorong ekspor sektor manufaktur dan menggalakkan pariwisata.

Langkah menurunkan suku bunga kredit yang dilakukan Bank Indonesia juga diharapkan dapat mendorong dunia usaha untuk lebih ekspansif. Mungkin dampaknya tidak seketika tetapi pada jangka panjang. Selain itu, optimisme juga disampaikan oleh Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartanto. Menurutnya, pemerintah telah menyiapkan 15 program percepatan (*quick wins*) yang akan menjadi prioritas untuk diselesaikan dalam jangka waktu enam bulan. Penyelesaian program prioritas ini sangat penting karena merupakan bagian dari arahan Presiden

yang menginginkan ada upaya untuk menjaga ketahanan ekonomi nasional dari tekanan global.

Berbagai program prioritas tersebut antara lain implementasi mandatori B30, perbaikan ekosistem ketenagakerjaan, Jaminan Produk Halal (JPH), penelitian dan pengembangan industri farmasi, penguatan Trans Pacific Petrochemical Indotama (TPPI) dan pembenahan kebijakan Kredit Usaha Rakyat (KUR).

Sementara itu, pesimisme beberapa pihak terkait pertumbuhan ekonomi juga patut menjadi perhatian pemerintah. Beberapa diantaranya datang dari kalangan oposisi dan pakar ekonom Rizal Ramli. Ia memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun depan hanya mampu tumbuh di angka 4 persen atau di bawah target 5,3 persen. Hal ini terjadi apabila tim ekonomi pemerintah tidak mengubah langkah perekonomian secara signifikan dan akan semakin menurunkan daya beli masyarakat.

Foto
Anas Nur Huda

Setiap bulan Media Keuangan mengajak partisipasi pembaca untuk memberikan opini lewat kuis di kanal instagram @majalahmediakeuangan dan twitter @kemenkeuri. Opini yang diberikan menanggapi topik-topik hangat pilihan redaksi.

-  www.kemenkeu.go.id
-  KemenkeuRI
-  @KemenkeuRI
-  KemenkeuRI
-  KemenkeuRI
-  majalahmediakeuangan



@majalahmediakeuangan Sampaikan secara singkat optimisme dan harapan Anda terkait kondisi perekonomian nasional di tahun 2020



Like

Reply



@hattamaulana berkaca dari tahun 1998 kita bisa mengatasi masalah yang sama di tahun 2008 dengan aman dan tenang. Maka dari itu saya optimis 2020 kita bisa semakin kuat dan terus bertumbuh



@fajar.a.k.17 Laju perekonomian Indonesia pada 2020 diperkirakan akan lebih baik dibanding 2019. Perekonomian akan ditopang peningkatan investasi domestik dan asing, perbaikan ekonomi global dan bauran kebijakan pemerintah dan bank sentral



@arfandopranywijaya Pertumbuhan ekonomi dikatakan membaik jika produksi barang dan jasa terus bertambah dari waktu ke waktu. Maka dari itu, mari tingkatkan konsumsi dalam negeri serta melaksanakan kewajiban PPN agar perekonomian meningkat.



@KemenkeuRI Sampaikan optimisme dan harapanmu terhadap pengembangan pariwisata sebagai hal baru dan strategis dalam APBN TA 2020.



Like

Reply



@Komangeka_d Pengembangan pariwisata tepat untuk merangsang pertumbuhan ekonomi, dengan memperluas destinasi wisata di luar Bali. Pariwisata meningkatkan partisipasi masyarakat, tapi tidak memberatkan, karena dilakukan dengan enjoy dan sukarela



@Aldin05785148 sektor pariwisata diharapkan mampu membawa kesejahteraan rakyat. Untuk mencapainya diperlukan konsep/ formula 5A (akomodasi, aksesibilitas, atraksi, aktifitas dan amenities) berasaskan ekonomi kreatif.



@matheusrgar Dunia kepariwisataan dapat menjadi garda utama perekonomian di Indonesia dari sektor non-tambang. Dengan semua modal utama yang dimiliki serta jaminan keamanan yang menjamin kepariwisataan, maka bangsa ini optimis mendapatkan pendapatan negara maupun devisa.

AGAR PARIWISATA INDONESIA LEBIH MEMPESONA

Keindahan alam Indonesia berpadu dengan keragaman satwa dan hayati, merupakan kemewahan yang dihadiahkan Tuhan pada negeri ini. Belum lagi aneka rupa adat, seni, juga budaya. Sejuta potensi ini, selayaknya membawa pariwisata Indonesia jadi salah satu yang terbaik di dunia.

Pariwisata digadang menjadi salah satu sumber ekonomi baru Indonesia. Bahkan, di tengah situasi global yang tidak menentu, kinerja industri pariwisata Indonesia nyaris tidak terdampak. Pada 2018, sektor pariwisata berhasil menyumbang devisa bagi negara sebesar USD16 miliar atau setara dengan Rp229,5 triliun. Sementara untuk tahun ini, pemerintah menargetkan bisa mengantongi devisa hingga USD20 miliar atau setara dengan Rp280 triliun.

Presiden Joko Widodo telah menetapkan pariwisata sebagai salah satu sektor utama yang mendorong perekonomian nasional. Menanggapi hal ini, Ketua Pokja Pariwisata Nasional KEIN, Dony Oskaria, mengungkapkan terdapat beberapa alasan yang menjadikan pariwisata Indonesia menjadi tulang punggung ekonomi

Indonesia.

“(Pertama), keindahan alam dan budaya jadi keunggulan komparatif Indonesia dibanding negara-negara lain. Kedua, kalau kita mengejar ketertinggalan industri lain, *it takes time*. Ketiga, kita melihat *global trend*, terjadi perubahan perilaku yang luar biasa. Keempat, kebutuhan kita akan devisa yang tinggi,” sebutnya menjelaskan.

Sektor pariwisata lebih mudah didorong

Menurut Dony Oskaria, industri pariwisata lebih mudah dikembangkan. Sementara untuk mengembangkan dan mengejar ketertinggalan Indonesia pada industri lain, dibutuhkan lebih banyak waktu. “(Sebab) *produkt activity* kita rendah, tingkat pendidikan kita juga masih relatif rendah dibanding dengan

Pariwisata digadang menjadi salah satu sumber ekonomi baru

Foto
Hana Adi
Perdana



Pemerintah telah masif mempromosikan pariwisata Indonesia hingga ke mancanegara.

Foto
Dok.
Marisca
Prudence

pariwisata juga tercermin dengan banyaknya jumlah perjalanan wisatawan Indonesia di dalam negeri. Pada 2018, Badan Pusat Statistik menyebutkan, 43 persen dari total 303 juta perjalanan wisatawan Indonesia di dalam negeri, digunakan untuk berlibur dan rekreasi dengan rata-rata lama berpergian sebanyak tiga hari.

Ekskalasi daya saing

Untuk mengembangkan daya saing pariwisata, pakar sekaligus dosen Program Studi Vokasi Jurusan pariwisata UI, Diaz Pranita turut angkat bicara. Menurutnya, ada empat komponen utama yang perlu dipenuhi. “Infrastruktur harus oke, kapabilitas masyarakat dan destinasi itu harus mendukung, pemasaran harus *niche*, dan ujungnya penyampaian atau *product delivery* harus *real time*. Itu caranya supaya kita bisa kompetitif,” jelasnya. Selanjutnya, keempat hal tadi harus berorientasi kepada *sustainable development*. “*Basic* orientasinya harus *sustainability*,” tegasnya.

Terkait infrastruktur, Diaz juga menekankan perlunya memenuhi unsur 3A, yaitu aksesibilitas, amenities, dan atraksi. Aksesibilitas berhubungan dengan sarana dan prasarana seperti jalan dan alat transportasi. Selanjutnya amenities berhubungan dengan ketersediaan fasilitas pendukung yang dibutuhkan para wisatawan, seperti tempat menginap, tempat makan, dan fasilitas kesehatan. Sementara atraksi berkaitan dengan apa yang bisa dinikmati wisatawan, baik yang terkait dengan “*what to see*” dan “*what to*

do”.

Dalam hal atraksi ini, Diah mengatakan, penting bagi suatu daerah wisata untuk membangun *event*, agar wisatawan selalu punya alasan untuk berkunjung. “Dalam pariwisata, *rule of thumb*-nya kalau kita mau datang ke destinasi, minimal itu harus ada empat atraksi yang kita dapat,” ungkapnya. Dia mencontohkan Bandung sebagai kota tujuan wisata yang bisa memenuhi hal ini. “Dia punya kuliner, tempat makan banyak, hiburan menarik, terus punya budaya juga, serta kreatif. Banyak *banget* tempat-tempat seperti Maribaya dan segala macam. *Nah*, akhirnya orang *gak* bosan,” katanya.

Dony Oskaria juga menyepakati hal ini. Menurutnya, selain berperan menyokong industri pariwisata, *event* bisa menjadi cara elegan dalam mempromosikan Indonesia dengan biaya yang lebih murah. “*Event* jauh lebih murah daripada *branding* atau *marketing* yang selama ini dilakukan. Parameter yang jauh lebih besar dari sebuah *event* adalah membangun *sustainability*. Promosi yang kita dapatkan, *media exposure*, dan liputan melalui *event* ini mendatangkan orang untuk datang, tidak hanya ke *event*-nya, tetapi ke tempat-tempat lain,” ungkap Dony.

Ungkit Kapabilitas Masyarakat

Sementara dari sisi kapabilitas masyarakat, Diaz meyakini, hal itu menentukan keberhasilan pembangunan pariwisata di daerah. Menurutnya, masyarakat perlu dilibatkan dalam kegiatan pariwisata dan tidak dibiarkan hanya sebagai penonton. “Jadi masyarakat itu harus *support*, tidak hanya menjadi *host* yang baik, tapi juga terlibat dan berpartisipasi aktif dalam kegiatan pariwisata,” lanjutnya.

Maka, pendekatan *vocational training*, menurut Diaz, perlu digalakkan guna mengantisipasi kebutuhan tenaga kerja pariwisata di daerah, “Asal masyarakat itu di-*training*, itu berarti *skill* yang didapat adalah *skill* vokasi, cara melakukan sesuatu atau cara bekerja dan disertifikasi,” jelasnya. Sertifikasi, lanjutnya, perlu diberikan, sehingga ada tingkat keahlian tertentu yang perlu dicapai dan bisa memberikan kepercayaan diri bagi masyarakat.

Terkait pengembangan sumber daya, Dony menggarisbawahi agar alokasi dana pengembangan SDM berbasis pada destinasi, bukan pada sekolah tinggi pariwisata tertentu. “Kalau kita mau mengembangkan Danau Toba, misalnya, alokasi dana pengembangan SDM harus diperkuat di sana, melalui Balai Latihan Kerja (BLK) atau STP-nya, atau *short course*-nya dibuat di situ, sehingga SDM di destinasi itu juga kuat,” pesannya.

Promosi tepat sasaran

Pemerintah telah masif mempromosikan pariwisata Indonesia hingga ke mancanegara. Diaz memberi catatan pentingnya memetakan target pasar dalam mempromosikan destinasi wisata Indonesia, terlebih di era digital seperti sekarang. Era digital, menurutnya, memiliki karakteristik *mass customization*. “Jadi pasar yang dituju semakin massal dan terbuka, tetapi produk harus *custom*, spesialisasi, marketnya jelas siapa yang dituju,” jelasnya. Diaz menyontohkan, sasaran promosi destinasi Raja Ampat. Dengan keunggulan wisata selamanya, promosi Raja Ampat sebaiknya ditujukan langsung ke komunitas selam.

Sejalan dengan itu, Moekti

menyoroti pentingnya peran pemerintah daerah (Pemda) menentukan target pasar. “Pekerjaan rumah bagi Pemda untuk melihat peluang pasar di mana dan apa yang perlu disiapkan. Jadi tidak bisa (kesuksesan) Banyuwangi membangun daerah wisata, didaptasi mentah-mentah oleh daerah lain. Belum tentu berhasil karena kondisi alam dan masyarakatnya berbeda,” jelasnya.

Genjot Bali Baru

Upaya pemerintah menjadikan pariwisata sebagai tulang punggung ekonomi terlihat dengan dibangunnya sepuluh destinasi wisata prioritas. Lima diantaranya menjadi destinasi super prioritas, yaitu Danau Toba, Candi Borobudur, Mandalika, Labuan Bajo, dan Manado-Bitung-Likupang yang ditargetkan rampung pada 2020 mendatang.

Kepala Biro Komunikasi Publik Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Endra S. Atmawidjaja, menyebutkan, anggaran infrastruktur dalam mengembangkan Kawasan wisata di lima destinasi pada 2019 mencapai Rp1,6 triliun. Selanjutnya pada 2020, alokasi anggaran mencapai Rp7,6 triliun. “Infrastruktur yang dibangun pada lima destinasi prioritas tersebut, meliputi infrastruktur sumber daya air, jalan dan jembatan, permukiman, dan perumahan,” sebutnya.

Endra melanjutkan, pemerintah optimis pembangunan destinasi tersebut akan mampu menarik wisatawan dan investasi dunia usaha. “Melalui konsep *Integrated Tourism Master Plan* yang mengusung kearifan lokal pada desain infrastruktur serta menghadirkan paket wisata yang melibatkan masyarakat lokal, seluruh kesatuan konsep ini akan menjadi daya tarik sendiri yang menghadirkan pilihan destinasi wisata selain Pulau Bali bagi para wisatawan asing dan domestik,” harapnya.

Terkait pengembangan destinasi prioritas, Diaz menyampaikan harapannya. “Kita berharap banyak terhadap destinasi prioritas itu bisa benar-benar efektif, terutama dari sisi pemberdayaan masyarakatnya,” katanya. Selanjutnya, dia juga memberi sejumlah catatan. Pertama, pengembangan destinasi harus dipastikan sesuai dengan keunikan masing-masing. Kedua, perlu dilakukan pendekatan *sustainable tourism*. Ketiga, meskipun dilakukan dengan pendekatan bisnis, harus disediakan daerah dengan pendekatan *community based*, yaitu yang berpihak kepada masyarakat.

Teks Farida Rosadi

MENILIK POTENSI

Pariwisata Indonesia

“Pariwisata saya tetapkan sebagai leading sector. Pariwisata dijadikan sebagai *leading sector* ini adalah kabar gembira dan seluruh Kementerian lainnya wajib mendukung dan itu saya tetapkan.”

Presiden Joko Widodo di Rapat Terbatas Bidang Pariwisata

Istana Bogor, 16 Feb 2015



Country Branding
Wonderful Indonesia di 2019 menempati ranking **38 dunia** mengalahkan Malaysia dan Thailand.



Penetapan 10 Destinasi Prioritas dan 5 **Destinasi Wisata Super Prioritas** (Danau Toba, Borobudur, Labuan Bajo, Mandalika, Likupang).



Jumlah desa wisata sebanyak **7.275 desa** menyebar ke seluruh Indonesia



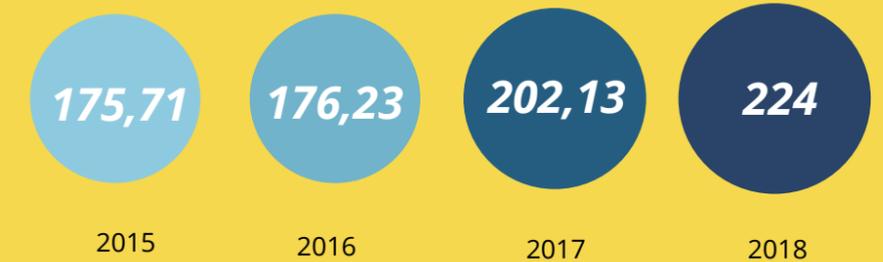
Alokasi anggaran infrastruktur sebesar **Rp7,6 T** untuk 5 Destinasi Wisata Super Prioritas. Pariwisata didorong menjadi penghasil devisa terbesar. Tahun 2019 diproyeksikan menyumbang **US\$20 M.**



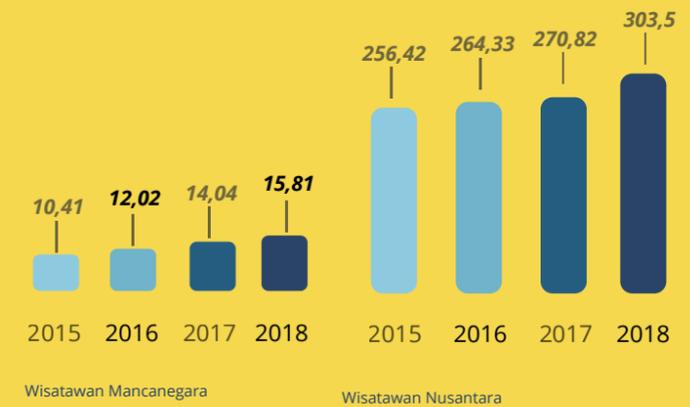
Kontribusi Pariwisata pada PDB Nasional (%)



Kontribusi Pariwisata pada Devisa (Triliun Rp)



Jumlah Kunjungan Wisatawan



Travel and Tourism Competitiveness



Jumlah Desa Wisata Mandiri



Sumber: Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan



GAIRAH PEMERINTAH OLAH PARIWISATA

Material vulkanik tua menghiasi panorama di Gunung Nglanggeran, sebuah gunung api purba di desa wisata Nglanggeran, Patuk, Gunung Kidul. Jutaan tahun lalu, gunung ini pernah aktif. Kini, ia menawarkan segala keunikan bentang alamnya sebagai pengobat penat para wisatawan. Tak seberapa jauh darinya, Embung Nglanggeran berada. Telaga buatan yang berfungsi mengairi perkebunan petani sekitar ini juga memiliki pemandangan yang tak kalah memukau, terutama kala senja menghampiri.

Keberadaan Nglanggeran sebagai area wisata telah lawas dikenal masyarakat. Namun, untuk makin mengembangkan sektor pariwisata, pemerintah Desa Nglanggeran memanfaatkan bantuan Dana Desa dari pemerintah pusat. Langkah serupa turut dilakoni Desa Ponggok di Klaten dan Desa Kutuh di Bali. Meningkatnya kunjungan wisatawan mendorong aktivitas ekonomi dan menurunkan pengangguran di ketiga daerah tersebut. Pariwisata telah membawa berkah bagi masyarakat sekitar.

Nglanggeran, Ponggok, dan Kutuh hanya sebagian kecil dari ribuan

desa wisata yang tersebar di seluruh pelosok negeri. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi menyebut saat ini terdapat 7.275 desa wisata di Indonesia. Angka ini belum termasuk 17.155 potensi desa wisata yang belum digali. Total, 24.430 desa wisata dimiliki bumi pertiwi.

Direktur Pembiayaan dan Transfer Non Dana Perimbangan Ditjen Perimbangan Keuangan, Adriyanto, mengatakan keagairahan desa membangun wisata terbaca dari peningkatan alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) untuk pembangunan wisata dan jumlah desa yang mengalokasikannya. Pada 2017, jumlah desa yang mandiri membangun wisata berjumlah 612. Tahun berikutnya, angkanya beranjak naik menjadi 817. Pada 2019, jumlahnya bahkan melonjak signifikan hingga 4.071. “APBDes yang dialokasikan untuk desa wisata juga meningkat dari Rp123 miliar pada 2017, menjadi Rp229 miliar pada 2018, lalu berlipat menjadi Rp552 miliar pada 2019,” jelas Adriyanto.

Desa wisata masuk prioritas

Pengembangan potensi desa wisata diamanatkan Presiden Joko Widodo sejak tahun lalu. Menindaklanjuti arahan ini, Kemenkeu bersama kementerian terkait, termasuk Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) telah menyepakati pemanfaatan Dana Desa untuk desa wisata menjadi prioritas. Adriyanto mengutarakan, kegiatan tersebut

dapat berupa pembangunan desa wisata, atraksi wisata dan amenitas, pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) wisata, embung, potensi wisata alam, serta ekowisata perhutanan sosial.

Kios cendera mata dan kios warung makan merupakan bangunan-bangunan yang lazim tertangkap mata saat kita mengunjungi suatu objek wisata. Begitu juga pondok wisata dan panggung hiburan di sekitaran objek wisata. Sumber pembiayaan pembangunannya dapat menggunakan Dana Desa yang dilalokasikan pemerintah tiap tahunnya. Tak hanya itu, pemerintah pun mendorong penggunaan Dana Desa untuk mengreasikan wahana permainan anak, wahana *outbond*, taman rekreasi, penginapan, tempat penjualan tiket, dan angkutan wisata. Dengan makin beragamnya fasilitas yang ditawarkan desa wisata, makin kaya pula pengalaman pengunjung, dan diharapkan makin tinggi jumlah wisatawan yang mendatangi.

Untuk meningkatkan pariwisata desa wisata secara lebih optimal, Adriyanto mengungkapkan pemerintah juga berupaya melakukan terobosan. Setidaknya terdapat tiga langkah penting yang dilakukan, yaitu pembenahan infrastruktur dasar desa wisata, penyediaan pusat informasi untuk wisatawan, dan penyediaan *homestay* di desa wisata. “Selain itu, dilakukan pula peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) desa wisata meliputi bimbingan teknis pengelolaan BUMDes, Prukades (Produk Unggulan Kawasan Pedesaan), dan KPMD (Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa),” tutur Adriyanto.

Dukungan melalui DAK

Peran strategis sektor pariwisata dalam mendukung perekonomian nasional disadari betul oleh pemerintah. Pariwisata merupakan satu dari lima fokus program pembangunan nasional pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015–2019 yang meliputi infrastruktur, maritim, energi, pangan, dan pariwisata. Lantaran menampilkan pertumbuhan yang selalu positif dari tahun ke tahun, sektor pariwisata bahkan ditetapkan sebagai *leading sector* ekonomi bangsa.

Bentuk dukungan pemerintah pusat terhadap pengembangan kepariwisataan daerah tak hanya berbentuk Dana Desa. Dukungan juga diberikan dalam bentuk Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Bidang Pariwisata dan DAK Non Fisik yaitu Dana Pelayanan Kepariwisataaan. Direktur Dana Perimbangan Ditjen Perimbangan Keuangan Putut Hari Satyaka menggarisbawahi salah satu tujuan DAK yakni untuk mendorong kegiatan prioritas nasional. Berbeda halnya dengan Dana Bagi Hasil (DBH) dan Dana Alokasi Umum (DAU), keduanya bersifat umum dan digunakan untuk prioritas daerah.

“DAK ini menjadi alat yang paling efektif jika pemerintah pusat mau menugaskan kepada daerah untuk melakukan hal-hal yang menjadi prioritas nasional,” tegas Putut. Oleh karena itu, setelah menyadari adanya

Tebing Breksi merupakan wisata alam dari endapan vulkanik erupsi Gunung Langgeran

Foto Dok. Biro KLI

prioritas program pariwisata, kata Putut, beberapa tahun terakhir Kemenkeu mulai mengalokasikan DAK untuk sektor pariwisata. Awalnya hanya berupa DAK Fisik, sebelum kemudian berlanjut mengalokasikan DAK Non Fisik kepada daerah. Putut menyatakan DAK akan dimanfaatkan untuk menunjang lima kawasan Super Prioritas, sepuluh Destinasi Prioritas Pariwisata (DPP), 88 Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) dan 222 Kawasan Pengembangan Pariwisata Nasional (KPPN).

Secara total, alokasi DAK fisik pada APBN 2020 mencapai Rp72,2 triliun yang penggunaannya diarahkan untuk peningkatan dan pemerataan infrastruktur layanan publik. Khusus untuk DAK Fisik Bidang Pariwisata, pada 2020 angkanya mencapai Rp1,003 triliun. Nantinya, DAK Fisik akan digunakan untuk pembangunan amenitas kawasan pariwisata di 186 daerah dan pembangunan atraksi daya tarik wisata di 306 daerah.

Sementara itu, alokasi Dana Pelayanan Kepariwisataan pada DAK Non Fisik APBN 2020 menyentuh Rp284,3 miliar, naik sebesar 33 persen dibanding tahun sebelumnya yang berjumlah Rp213,2 miliar. Menurut Putut, dana tersebut akan dipakai untuk meningkatkan kualitas destinasi pariwisata dan daya saing pariwisata daerah. Lebih fokus lagi yakni untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal dan perluasan kesempatan kerja di bidang pariwisata.

Rencananya, Dana Pelayanan Kepariwisataan akan dipakai untuk program pelatihan 103.720 peserta di 73 *Tourist Information Center*, 106 museum, serta 20 taman budaya. “Jika ke tempat wisata tradisional di daerah, kita sering melihat mereka belum familiar dengan *nature* pariwisata. Misalnya dari segi kebersihan atau penyajian, sering kali ditemui penggunaan tisu toilet di meja makan yang sebenarnya tidak cocok bagi turis asing,” tutur Putut. Menurutnya, meski kejadian tersebut merupakan hal simpel, tetapi jika tidak dilakukan pelatihan, masyarakat tidak akan memahaminya.

Walau sudah terdapat alokasi DAK untuk bidang pariwisata, dukungan untuk pengembangan sektor pariwisata dapat bersumber pula dari DAU dan DBH. Pemerintah menetapkan kebijakan penggunaan 25 persen dari DAU dan DBH untuk pembangunan infrastruktur, yang antara lain dapat dipakai untuk membangun sarana aksesibilitas pariwisata. “Pemda mendapatkan DAU dan DBH. Mereka juga mempunyai PAD (Pendapatan Asli Daerah). Tentunya, ada komitmen tertentu yang harus mereka ambil untuk mendukung pengembangan pariwisata di daerahnya, terutama

jika sudah masuk dalam kawasan strategis prioritas nasional untuk pariwisata,” ujar Putut.

Penyelesaian lima destinasi super prioritas

Pengembangan lima destinasi wisata super prioritas merupakan salah satu kebijakan dan inisiatif utama dalam APBN 2020. Percepatan penyelesaian destinasi wisata Danau Toba, Borobudur, Labuan Bajo, Mandalika, dan Likupang sangat membutuhkan sinergi lintas kementerian/lembaga (K/L) dan pemerintah daerah. Adapun K/L yang terlibat dalam program ini ialah Kemenparekraf, Kementerian PUPR, Kemenhub, KLHK, Kementerian ESDM, Kemendes DPT, dan Kemendikbud.

Direktur Anggaran Bidang Perekonomian dan Kemaritiman Ditjen Anggaran Made Arya Wijaya menjelaskan, alokasi anggaran K/L untuk pengembangan kelima destinasi tersebut mencapai Rp9,4 triliun pada APBN 2020. Artinya, alokasi tahun 2020 mengalami kenaikan enam kali lipat dibanding tahun 2019. Dana tersebut tidak hanya terpusat di Kemenparekraf. Justru, alokasi terbesar anggaran pengembangan pariwisata super prioritas berada di Kementerian PUPR yang dipercaya mengelola Rp7,2 triliun. Made mengatakan, “Untuk pengembangan Danau Toba, Borobudur, dan Labuan Bajo dibentuk Badan Pelaksana Otoritas yang dibiayai APBN. Sementara itu, untuk pengembangan Mandalika dan Likupang dibentuk Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) yang dikelola swasta.”

Pengamat pariwisata dari Universitas Jenderal Soedirman Chusmeru menilai destinasi wisata super prioritas sudah memadai secara fisik. Infrastruktur

pendukung pariwisata seperti jalan, jembatan, pelabuhan, dan bandar udara di destinasi tersebut sudah mampu meningkatkan konektivitas. Begitu pula *event* berskala nasional maupun internasional telah digelar di sana.

Namun demikian, ia menilai faktor keamanan dan kenyamanan wisatawan patut mendapat perhatian serius. Ia mencontohkan kasus kecelakaan kapal feri di Danau Toba, serta persoalan sampah dan perkosaan wisman di Labuan Bajo. “Kesadaran masyarakat, termasuk juga kesadaran wisatawan tentang kebersihan masih perlu ditingkatkan,” tutur Chusmeru. Selain itu, ia berpendapat pengembangan sektor pariwisata sangat tergantung pada faktor 4A, yaitu *accessibility*, *amenity*, *attraction*, dan *ancillary*. Chusmeru menegaskan upaya menjangkau wisatawan perlu dibarengi dengan pembenahan faktor 4A tersebut.

Di sisi lain, Made membeberkan sejumlah tantangan yang dihadapi dalam pembangunan pariwisata di Indonesia, terutama dari sisi penganggaran. Ia mengakui pembangunan pariwisata memerlukan dana besar sehingga tidak cukup hanya mengandalkan APBN/APBD, tetapi perlu peran swasta dan BUMN. Selain itu, pengembangan kawasan pariwisata banyak terkendala dalam pembebasan tanah, ganti rugi, dan adanya konflik sosial. Terkait peran swasta, Chusmeru mengiyakan pentingnya keterlibatan swasta dalam memajukan pariwisata di Indonesia. Tak hanya dalam pembangunan infrastruktur penunjang pariwisata, swasta juga dibutuhkan dalam hal investasi dan promosi objek wisata di tanah air.

Teks Reni Saptati D.I

Pemerintah serius menggarap sektor pariwisata dengan menetapkan percepatan pengembangan destinasi wisata prioritas.

Foto Dok. Marisca Prudence

MERAMU PESONA WISATA PRIORITAS

Indonesia ditaburi dengan ragam keindahan yang membentang sepanjang Sabang sampai Merauke. Pegunungan, danau, laut, sungai, bahkan produk kebudayaan, tak satu pun layak dikufuri. Nyaris seluruhnya menawan. Potensi sebesar ini sudah semestinya dikembangkan.

Pada 2018, sektor pariwisata menyumbang devisa sebesar Rp224 triliun dari target yang ditetapkan sebesar Rp223 triliun. Angka ini setara dengan lima persen kontribusi terhadap angka Produk Domestik

Salah satu upaya menunjang program pemerintah di sektor pariwisata adalah dengan meningkatkan aksesibilitas menuju destinasi wisata.

Shana Fatina Sukarsono, Kepala Badan Otorita Pariwisata Labuan Bajo Flores

Bruto (PDB). Di periode yang sama, jumlah kunjungan wisatawan mancanegara tumbuh sebesar 12,61 persen. Dengan racikan strategi yang tepat, potensi ini tentu akan mampu mendorong perekonomian negara.

Seakan pantang melewatkan kesempatan, pemerintah serius menggarap sektor pariwisata dengan menetapkan percepatan pengembangan destinasi wisata prioritas. Terdapat lima destinasi wisata yang dikategorikan sebagai destinasi wisata super prioritas pada 2020 mendatang. Destinasi tersebut meliputi Danau Toba, Borobudur, Labuan Bajo, Kuta Mandalika, serta Likupang.

Aksesibilitas dan informasi

Shana Fatina Sukarsono, Kepala Badan Otorita Pariwisata Labuan Bajo Flores (BPOLBF), mengatakan salah satu upaya menunjang program pemerintah di sektor pariwisata adalah dengan meningkatkan aksesibilitas menuju destinasi wisata. Ia memaparkan strategi untuk meningkatkan aksesibilitas ini mencakup tiga hal. “Pertama, Komodo menjadi bandara internasional,” ia melanjutkan, “lalu percepatan jalan strategis nasional lintas utara.” Jalan nasional ini nantinya juga akan digunakan sebagai jalur menuju pelabuhan baru. Strategi ketiga adalah dengan memindahkan pelabuhan peti kemas sehingga pelabuhan yang saat ini ada di Labuan Bajo akan fokus untuk wisata saja.

Faktor aksesibilitas yang diklaim Shana sebagai *critical success factor*, diamini pula oleh Marischka Prudence, *traveler* yang telah mencicipi beragam rupa destinasi wisata. Marischka mengatakan bahwa salah satu bagian penting untuk mengembangkan destinasi wisata adalah ketersediaan bandara. “Kalau dia akses dari bandara sudah mudah ya, biasanya cepat banget sih naiknya (kunjungan wisata),” katanya. Selain aksesibilitas, faktor penting lainnya adalah ketersediaan informasi. “Negara-negara yang sudah maju,” katanya, “misalnya tempatnya jauh, tapi wisatawan yang *solo traveler* itu bisa (mengunjungi).”

Peran lokal

Tak cukup sampai di situ, Marischka juga berpendapat bahwa sikap masyarakat setempat juga punya andil yang tak kecil terhadap minat wisatawan berkunjung. “Itu penting sih, terutama soal aman ya.

Ada tempat-tempat tertentu yang kita datang serasa dipalak. Di sini bayar, di depan bayar lagi, terus tiba-tiba ada yang *nyamperin*” katanya menceritakan. Perkara semacam ini menurutnya mungkin terjadi karena masyarakat setempat ingin turut mencicipi untung tanpa benar-benar tahu harus melakukan apa. “Kadang mereka tidak mengerti, mereka bisa loh dapat penghasilan (misalnya) dengan jualan *minuman*, mereka tahunya ‘pokoknya saya temani’ gitu,” katanya.

Menanggapi faktor masyarakat lokal, Shana mengatakan bahwa pihaknya mengembangkan program-program untuk meningkatkan kapasitas kepariwisataan masyarakat lokal. “Khususnya untuk di Flores dan Labuan Bajo kita melihatnya bagaimana mengakselerasi *skill* masyarakat lokal,” katanya. Peningkatan kapasitas ini salah satunya digerakkan melalui sertifikasi vokasi serta pelatihan-pelatihan khusus, misalnya pelatihan pemandu selam. BPOLBF menggelar program ini bersama-sama dengan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.

Selain program penguatan SDM masyarakat lokal, sejalan dengan arah Presiden untuk membangun Labuan Bajo menjadi destinasi wisata premium, Shana mengatakan pihaknya mengembangkan atraksi-atraksi premium. “Di sini yang kita tekankan adalah otentiknya Flores dan Labuan Bajo, kemudian *privacy*,” ia melanjutkan, “jadi bagaimana orang di sini merasa *luxury*.” Ia mengatakan bahwa *luxury* bukan berarti selalu mahal, melainkan menawarkan pengalaman dan sensasi yang langka. “Misalkan naik kapal kayuh biasa tapi duduk di depannya laut juga (terasa) wow gitu ya,” katanya menggambarkan.

Segala upaya mendandani Labuan Bajo adalah manifestasi upaya pemerintah mengangkat potensi yang selama ini ada. Shana berharap wajah Labuan Bajo dan Flores akan menjadi lebih baik di masa depan. Sementara itu, Marischka berharap pemerintah untuk tak terlalu lama terbuai menggarap satu wilayah sehingga terlewat mengembangkan potensi wilayah lain. “Yang sudah di-*concern* nih di satu periode, *next*-nya cari yang lain lah. Karena kita kan ada (potensi wisata) banyak banget nih,” katanya berharap.

Teks A. Wirananda

Laporan Utama



Wishnutama Kusubandio, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

Foto Dok. Kemenpar dan Ekraf

KALA PARIWISATA DAN KREATIVITAS BERPADU

Pariwisata digadang jadi sumber ekonomi baru. Kinerja pariwisata yang semakin membaik dari tahun ke tahun membawa optimisme bagi Indonesia. Sejumlah strategi dijalankan. Salah satunya melalui pembangunan sepuluh destinasi wisata unggulan. Kini, dengan disatukannya Kementerian Pariwisata dan Badan Ekonomi Kreatif, kinerja pariwisata diharapkan semakin gemilang. Simak wawancara Media Keuangan bersama Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Wishnutama Kusubandio, mengenai upayanya dalam memajukan pariwisata Indonesia.

Seperti apa visi dan misi Presiden Joko Widodo di bidang Pariwisata?

Visi dan misi Presiden seperti yang telah disampaikan di beberapa kesempatan, adalah menjadikan pariwisata sebagai penghasil devisa nomor satu di tanah air, produk ekonomi kreatif Indonesia menjadi terbaik di kawasan ASEAN, serta menjadikan pariwisata dan ekonomi kreatif sebagai sumber kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

Bagaimana langkah-langkah Bapak dalam menjalankan visi dan misi tersebut?

Kita fokus pada pengembangan infrastruktur di sepuluh destinasi prioritas, yang saat ini difokuskan menjadi lima destinasi super prioritas di mana infrastruktur dan utilitas dasar akan selesai akhir 2020. Lima destinasi super prioritas yakni Danau Toba, Labuan Bajo, Borobudur, Mandalika, dan Likupang. Kelima destinasi tersebut diharapkan menjadi daya tarik tersendiri yang mampu mendatangkan wisatawan mancanegara. Sambil secara berkesinambungan dengan penataan destinasi lain di seluruh wilayah tanah air yang diperkuat dengan atraksi seperti pembuatan event berskala nasional dan internasional yang disesuaikan dengan potensi masing-masing daerah.

Selain itu, kami (memang) fokus mengejar target wisatawan di tahun ini. Fokus pasar dan *niche market* terus dikembangkan sebagai kantong-kantong penyumbang wisman baru ke Indonesia. Bersama dengan pihak industri dan semua pihak terkait, Kemenparekraf akan berupaya maksimal. Termasuk dalam melanjutkan strategi yang telah dicanangkan sebelumnya seperti optimalisasi program *cross border tourism*; *hot deals*, *tourism hub*, dan *low cost carrier terminal* (LCCT).

Pada Kabinet Indonesia Maju, Kementerian Pariwisata digabung dengan Badan Ekonomi Kreatif. Seperti apa cara Bapak mengelola dua bidang yang sebelumnya terpisah tersebut?

Peran dan tugas penggabungan kedua lembaga itu akan berjalan sesuai tugas dan fungsi masing-masing. Tugas kementerian yang melaksanakan urusan di bidang pariwisata nantinya akan diperkuat dengan

menambahkan fungsi ekonomi kreatif, sehingga saling mendukung dan memperkuat satu dan lainnya.

Apa yang sudah dijalankan oleh Bekraf tetap dijalankan. Mereka punya tanggung jawab sendiri di setiap deputi. Kita tidak memikirkan ego sektoral, (sebab) kepentingan Indonesia lebih besar dan itu yang kita utamakan.

Menurut Bapak, apa yang perlu dioptimalkan dari dunia pariwisata kita untuk menjaring lebih banyak wisatawan?

Potensi sumber daya alam, budaya, dan kreatifitas yang dimiliki Indonesia sudah tidak diragukan lagi. Tinggal bagaimana kita mengemas beberapa *event* pariwisata dan ekonomi kreatif. Keduanya saling mendukung, sehingga akan mendatangkan banyak wisatawan mancanegara (wisman) ke Indonesia. (Untuk itu), kami juga akan mengemas acara dan festival di daerah dengan sebagus dan sekreatif mungkin, karena dengan kemasan dan acara yang menarik akan bisa mengundang wisatawan dan membelanjakan uangnya di sini.

Bagaimana bentuk koordinasi yang dilakukan antara Kementerian/Lembaga (K/L) dalam upaya mencapai visi misi Presiden di bidang pariwisata tadi?

Saat Presiden menetapkan pariwisata untuk didorong sebagai penghasil devisa nomor satu di tanah air, tentu K/L terkait harus ikut mendorong dan itu sudah terlaksana. Kami terus

berkoordinasi dengan K/L lain dan itu sangat cair, sehingga target yang ditetapkan presiden *Insha Allah* akan tercapai. Kementerian PUPR dan Kementerian Perhubungan saat ini sedang melakukan pembangunan infrastruktur yang direncanakan sebelumnya, sehingga nantinya diharapkan dapat benar-benar mendorong tingkat jumlah wisatawan.

Selain itu, kami juga telah berdiskusi dengan Kementerian BUMN dan Kementerian Luar Negeri untuk turut mendukung program pemerintah meningkatkan Indonesia sebagai destinasi wisata. Kapolri sudah menyampaikan akan mendukung dalam hal keamanan. Begitu juga Kepala BNPB. Kami sudah diskusi bagaimana langkah ke depan menghadapi sesuatu yang akan terjadi seperti bencana alam.

Bagaimana alokasi anggaran APBN untuk program-program pariwisata di Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf)?

Untuk tahun 2020, Kemenparekraf mengusulkan anggaran sebesar Rp10 triliun atau sebesar 0.4 persen dari APBN 2020. Namun yg disetujui sebesar 44,8 persen dari usulan Rp10 triliun, yaitu sebesar Rp4,44 triliun. Kemenparekraf tentunya akan memaksimalkan anggaran dan sumber daya lain dalam mewujudkan apa yang telah ditetapkan.

Teks Farida Rosadi

Tahukah kamu?

DIPA adalah Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran. Dokumen ini memiliki fungsi sebagai dasar pelaksanaan anggaran setelah mendapat pengesahan Menteri Keuangan (Menkeu).

Secara formal, umumnya dokumen DIPA akan diserahkan secara simbolis oleh Presiden RI kepada para menteri dan gubernur setiap akhir tahun sebelum tahun anggaran berjalan.

Dalam terminologi pengelolaan keuangan daerah DIPA ini disebut dengan DPA atau Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang dilaksanakan oleh satuan kerja daerah atau Pemerintah Daerah.



Miliki Hunian Bukan Impian

Salah satu kebutuhan utama manusia adalah tempat tinggal. Namun, kondisi saat ini di negara kita menunjukkan adanya ketidakseimbangan antara penyediaan dan permintaan rumah. Akibatnya, muncul angka *backlog* perumahan (kesenjangan antara jumlah rumah terbangun dengan jumlah rumah yang dibutuhkan) yang tinggi, bahkan mencapai 11 juta pada tahun 2019. Di sisi lain, masyarakat juga menginginkan ketersediaan tempat tinggal yang layak dan terjangkau. Sementara, harga rumah dari hari ke hari kian meroket.

Pemerintah terus memacu ketersediaan rumah untuk menurunkan defisit rumah di Indonesia. Mungkin belum banyak masyarakat yang tahu, bahwa salah satu *special mission vehicle* di

Kementerian Keuangan juga memiliki tugas untuk mendukung kepemilikan rumah layak dan terjangkau bagi masyarakat. Ia adalah PT Sarana Multigriya Financial (SMF). Sebagai sebuah entitas mandiri, PT SMF memiliki misi utama membangun dan mengembangkan pasar pembiayaan sekunder perumahan. Misi lainnya adalah meningkatkan ketersediaan sumber dana jangka panjang bagi sektor perumahan dan memungkinkan kepemilikan rumah menjadi terjangkau bagi setiap keluarga Indonesia. Media Keuangan mendapat

Homestay Puwon merupakan salah satu homestay di Desa Nglaggeran yang dibiayai oleh SMF

Foto
Dok. PT SMF

kesempatan untuk berbincang dengan Direktur Utama PT SMF, Ananta Wiyogo. Berikut petikannya.

Salah satu visi Presiden kita adalah mempercepat pembangunan infrastruktur di Indonesia. Bagaimana peran SMF dalam infrastruktur perumahan?

Dalam bidang infrastruktur perumahan, ada *demand side* dan *supply side*. Misi dan tugas ruang lingkup SMF adalah dari segi *demand side*. Kami menyediakan dana jangka panjang yang dipinjamkan kepada penyalur-penyalar Kredit Pemilikan Rumah (KPR), biasanya pihak perbankan. Untuk memberikan kredit perumahan jangka panjang 15-20 tahun, sumber dananya mesti dana jangka panjang. Kami menyediakan sumber dana tersebut, itu peran pertama kami.

Kedua, kami juga menyediakan likuiditas bagi penyalur KPR yang memerlukan dana-dana jangka panjang untuk perumahan. Salah satu caranya, kami membeli aset mereka. Kemudian, dari aset yang sudah dibeli, *portfolio mortgage*-nya, KPR-nya kami sekuritisasi. Itu sudah berlangsung sejak kami berdiri pada 2005 serta efektif melakukan operasional pada 2007. Sejak itu, kami telah menyalurkan dana untuk perumahan kurang lebih sebesar Rp47 triliun, terdiri atas Rp37 triliun penyaluran pinjaman atau *refinancing* dan sisanya 10 triliun berupa sekuritisasi. Itu adalah bukti nyata peran SMF dalam membantu pembiayaan perumahan.

Sebenarnya kondisi backlog perumahan kita saat ini seperti apa?

Backlog perumahan merupakan tumpukan *demand* rumah yang tidak bisa disuplai. Akumulasinya sampai saat ini mencapai 11 juta rumah. Angka ini *existing*

dan masih ditambah kebutuhan rumah serta suplai rumahnya yang masih pincang setiap tahun. Situasinya saat ini seperti itu dan tidak bisa diselesaikan hanya dari *demand side* saja. Orang butuh rumah, tetapi biaya pembangunan rumahnya dari mana? SMF belum sampai ke sana, tetapi ada keinginan kami untuk bisa membiayai dari *supply side*-nya juga. Kami menyadari, untuk *me-reduce backlog*, *supply* dan *demand*-nya tetap harus dijaga.

Tantangan yang dihadapi dalam mengurangi *backlog* perumahan adalah bagaimana sisi penyediaan perumahan dapat memenuhi kebutuhan akan rumah. Selain itu pertumbuhan penduduk yang terjadi dari tahun ke tahun juga akan meningkatkan kebutuhan baru akan perumahan.

Berapa target pembiayaan perumahan tahun ini?

Target nasional untuk KPR Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) atau KPR subsidi sekitar 68.000 rumah atau kurang lebih senilai Rp9 triliun. SMF menyediakan 25 persen porsi pendanaan KPR subsidi pemerintah tersebut. Di samping KPR FLPP, kami juga menyediakan pembiayaan untuk KPR lain bagi kalangan menengah ke bawah dengan target pembiayaan tahun ini kurang lebih Rp9 triliun sampai dengan Rp10 triliun. Kami juga memiliki target sekuritisasi sebesar Rp2,2 triliun. Jadi, bagi kami tahun ini cukup *challenging*.

Selama ini apakah penyaluran pembiayaan juga sampai ke daerah?

Kami aktif bekerja sama dengan Bank Pembangunan Daerah (BPD) dari Aceh sampai Papua. Mereka yang paling tahu kondisi daerah masing-masing. Kami



Ananta Wiyogo,
Direktur Utama
PT SMF

Foto
Resha Aditya

terhadap kondisi daerah Indonesia yang *fragile* terhadap bencana. Kami melihat di Jepang terdapat lembaga semacam SMF yang bernama Japan Housing Finance mempunyai *product* sejenis. Nah, kami kemarin juga berdiskusi dengan mereka. Kami belajar dan coba terapkan di Lombok.

Ke depannya, apa saja tantangan SMF dalam pembiayaan infrastruktur perumahan?

Pertama adalah bagaimana SMF bisa mendapatkan dana jangka panjang dengan suku bunga kompetitif. Kita tahu bahwa sumber dana *capital market* di Indonesia *limited*. Untuk memperoleh sumber dana dari luar negeri dalam rupiah juga tidak mudah. Sementara apabila sumber dana dalam valuta asing, SMF akan terdampak risiko nilai tukar mata uang karena penyaluran SMF seluruhnya dalam rupiah.

Suku bunga yang terus naik menjadi tantangan berikutnya. Itu sangat mengganggu kami. Kalau suku bunganya *at least* bisa *single digit* dan stabil itu lebih bagus. Fokus kami ke depan juga adalah bagaimana menggiatkan portofolio KPR, terutama di BPD. Untuk hal itu, kami siap memasok sumber dana jangka panjang.

Tantangan di pembangunan infrastruktur perumahan bukanlah *demand*-nya, tetapi *supply side* dan letak rumahnya di mana. Kalau milenial ingin adanya perumahan yang *affordable* tapi di tengah kota, bisa tidak kita memenuhi? Generasi muda ingin rumah dekat kantor dan *convinience*. Oleh karena itu, suplai rumah yang *adequate* tapi *affordable* juga menjadi tantangan kami.

Teks Reni Saptati D.I

membantu baik dari segi penyediaan SOP, pelatihan, maupun pembiayaan. Yang terpenting, tiap BPD didorong untuk memiliki KPR di *portfolio lending* mereka.

OJK sudah men-*support* hal tersebut. Sekarang kami sedang meminta dukungan dari kepala-kepala daerah sebagai pemilik BPD agar mereka turut mendukung dan memerintahkan BPD untuk aktif membukukan KPR-KPR bagi penduduk di daerahnya. KPR *existing* dari seluruh BPD jika disatukan masih kecil, angkanya tidak sampai Rp1 triliun.

Dalam rangka mengembangkan pariwisata sebagai salah satu program nasional, bagaimana dukungan SMF?

Kami ditugaskan untuk membantu pembangunan *homestay* di daerah *New Bali Destination*. Ada sepuluh *Bali Destination*, dan SMF sudah menandatangani MOU dengan Kementerian Pariwisata. Ada empat destinasi yang difokuskan pada 2019, yaitu Borobudur, Danau Toba, Mandalika dan Labuan Bajo. Kita sudah ada *pilot project* di daerah Borobudur. PT SMF telah mengembangkan *homestay*

untuk destinasi wisata Borobudur pada dua lokasi, yaitu Desa Nglanggeran di Yogyakarta dan Desa Samiran di Boyolali. Begitu hasilnya baik, kami akan mereplikasi ke semua *New Bali Destination*.

Apakah ada skema pembiayaan pembangunan infrastruktur perumahan untuk mendukung restrukturisasi dan rehabilitasi daerah terdampak bencana?

Yang menjadi perhatian kami adalah bagaimana kami bisa menolong saudara-saudara yang tertimpa bencana. Kami melihat kejadian di Palu, Lombok, Tanjung Lesung, dan di Lombok. Kota Lombok menjadi fokus awal kami. Kami mengembangkan KPR Pasca Bencana bekerja sama dengan Bank NTB Syariah di Lombok. Kami berupaya untuk membantu 3000 ASN yang perlu perbaikan rumah. Kami memberikan bantuan jangka panjang dengan bunga yang sangat kompetitif, sekitar 7,5 persen. Itu ke masyarakatnya, sedangkan dari SMF ke banknya lebih murah lagi.

KPR Pasca Bencana sudah ada sejak tahun kemarin. Ini bentuk respons kami



KEMENTERIAN KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA



Akses Dokumen
Hukum di Bidang
Keuangan dan
Kekayaan Negara
dengan mudah
lewat aplikasi JDih
Kemenkeu Mobile

scan untuk unduh



www.jdih.kemenkeu.go.id

Bekerja dengan Hati, Berinovasi Tiada Henti

HENI KARTIKAWATI
Kepala Pusdiklat KU, BPPK

Foto
Anas Nur Huda

Tiga tahun awal pertama bekerja di Kementerian Keuangan diingat Heni Kartikawati sebagai momen yang lumayan sulit. Saat itu, ia harus berlutut dengan pekerjaan

rutin dengan fasilitas kerja yang minim. Ditambah lagi saat itu unsur senioritas masih sangat kental dan hal-hal yang sifatnya material masih mendominasi pekerjaan. Belum lagi proses mutasi juga belum memiliki sistem yang mumpuni.

“Menghadapi situasi tersebut saya pun berusaha untuk mencoba mencari peruntungan setelah *eligible* untuk mendaftar beasiswa. Mengapa saya bilang peruntungan? Soalnya saat itu bukan yang terlalu niat sekali mengingat saya baru saja melahirkan,” kenangnya.

Namun Allah memang Maha Baik, Heni pun mendapatkan kesempatan untuk belajar di luar negeri melalui beasiswa dari *Personal Human Resource Development (PHRD)*. Baginya mendapatkan beasiswa saat itu banyak sekali hikmahnya. Heni tidak hanya mendapat kesempatan emas untuk menambah khasanah keilmuan dan memperoleh gelar Master. “Saya juga bisa keluar dari situasi yang kurang kondusif dan mendapatkan banyak pengalaman positif,” tutur wanita lulusan Master of Arts in International Development, Nagoya University, Jepang.

Pengalaman itu pula yang memberikan pengaruh besar dalam bekerja. Ia tidak ingin ada pegawai yang merasakan pengalamannya yang kurang menyenangkan di tiga tahun awal bekerja. Untuk itu, ia berusaha membangun lingkungan kerja yang kreatif dan kolaboratif dimana para pegawai bisa mendapatkan kesempatan untuk bekerja di luar rutinitas dan keluar dari zona nyaman mereka. “Saya berharap dapat memacu *creative thinking* teman-teman pegawai

di lingkungan Pusdiklat Keuangan Umum. Dengan demikian akan tercipta *value* lebih untuk organisasi dan mereka juga dapat berkembang menjadi pribadi yang memiliki ‘*meaning*’,” ujarnya.

Sepenuh hati dalam berinovasi

Dalam rangka menampung ide-ide inovasi para pegawai, Heni merancang beberapa program kegiatan seperti *Innovation Day* dan Box Inovasi. *Innovation Day* diadakan setiap bulan pada minggu ketiga dengan tagar #bahagiaberinovasibersamaKU. Selain itu, di setiap lantai juga diletakkan Box Inovasi.

“Saya ingin dapat mengembangkan kapasitas berinovasi dan mendiskusikan ide-ide inovasi pegawai untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi atau yang bersifat perbaikan berkelanjutan dalam upaya menciptakan *value* lebih dari *output-output* yang dihasilkan pusdiklat KU,” terangnya.

Taman Bersama adalah juga merupakan salah satu kegiatan yang digagasnya untuk meningkatkan sinergi dengan cara yang menyenangkan. “Jadi, kami membuat taman di *rooftop*. Tujuannya tidak hanya sekedar memanfaatkan ruang kosong menjadi tempat yang nyaman untuk teman-teman pegawai namun juga dengan semangat menumbuhkan rasa memiliki dan sinergi yang lebih kuat melalui kegiatan “rekreasi” bersama,” tuturnya.

Sosok Bapak sebagai inspirasi

Saat berbincang mengenai apa yang memotivasinya bekerja sebagai ASN di Kemenkeu, ia menjawab pada awalnya tidak memiliki keinginan untuk menjadi ASN. Hal ini dikarenakan selain kedua orang tua dan dua kakak pertamanya adalah ASN, ia juga sedang dalam masa

mengejar mimpinya meraih gelar profesi di bidang psikologi. Namun, saat Kemenkeu membuka pendaftaran CPNS, ia pun mencoba mendaftar. “Awalnya iseng saja. Saat lihat Kemenkeu ada lowongan ada formasi untuk S1 Psikologi,” Heni menjelaskan.

Setelah mengikuti semua tahapan, ternyata ia dinyatakan lulus. Ia pun sempat bimbang sebab masih menjalani kuliah di program profesi psikologi sementara jika dijalani bersamaan akan ada kesulitan terutama dari sisi waktu. “Sempat ragu mau diambil atau tidak ya sampai akhirnya almarhum Bapak bilang supaya diambil saja. Bapak bilang kalau sekolah bisa dapat kesempatan lain tapi mendapat pekerjaan itu tidak gampang,” tuturnya sambil mengenang ucapan almarhum Bapak.

Akhirnya, ia mengambil kesempatan bekerja di Kemenkeu dan impian gelar profesi pun dapat diraihinya setelah mengikuti Pendidikan Magister Profesi Psikologi. Semua itu dapat ia rasakan karena ia menuruti arahan almarhum Bapak.

Dalam kehidupannya, Heni memang sangat dekat dengan almarhum Bapak. Baginya, almarhum Bapak adalah sosok inspiratif yang ia kagumi. Kedekatannya dengan almarhum Bapak memberikan pengaruh besar dalam membentuk sifat dan karakternya terutama saat memimpin Pusdiklat Keuangan Umum.

“Pemimpin pada saat memimpin tidak bisa lepas dari karakter yang membentuknya. Meskipun saat kecil saya tidak bisa tidur kalau tidak ada ibu, tapi saya “anak Bapak”. Lebih banyak menghabiskan waktu dan lebih banyak terbuka dengan Bapak, itu mungkin yang menyebabkan karakter kami mirip,” ucapnya.



Heni bersama keluarga

Foto Dok. Pribadi

Salah satu sifat Bapak yang ia resapi dalam bekerja adalah ketekunan. “Bapak memiliki integritas tinggi, sangat bijak dan tekun menyelesaikan tanggung jawabnya,” tuturnya. Hal ini juga yang ia terapkan saat menginisiasi *Corporate University* (Corpu) di BPPK. Langkah yang pertama kali ia lakukan adalah mengedukasi BPPK mengenai Corpu melalui proses *benchmarking* dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM) dengan metode *action learning*. Selain itu, serangkaian *workshop* juga dilakukan untuk menilai kondisi saat itu dan juga memetakan kesiapan organisasi serta SDM. Setelah itu, ia berfokus pada sisi perbaikan sebelum akhirnya membuat program uji coba Corpu.

“Alhamdulillah sampai hari ini sudah semakin jelas bentuknya, bahkan sudah mendapatkan penghargaan berskala internasional. Hal yang tidak kalah membanggakan adalah Kemenkeu Corpu sudah menjadi tujuan *benchmarking* bagi K/L lain,” terangnya.

Tantangan berbuah pengalaman berkesan

Selama bekerja di Kemenkeu, penugasan saat menjadi Kepala Balai Diklatpim di Magelang menjadi tugas yang

dianggapnya paling menantang. Sebagai Kepala Balai, porsi untuk melakukan aktivitas analitis cenderung lebih sedikit. Kepala Balai dituntut untuk lebih banyak bekerja dengan cara membangun hubungan dengan unit mitra. Tentu saja itu sangat menantang bagi seseorang yang selama kurang lebih 20 tahun dominan bekerja sebagai pembuat kebijakan.

“Selama menjadi Kepala Balai saya belajar banyak dari rekan-rekan balai. Belajar cara menghadapi peserta dan pengajar dengan beragam karakter. Belajar menghadapi kompleksitas membangun hubungan yang lebih luas sebab wilayah kerja Balai Diklatpim mencakup seluruh Indonesia. Meskipun tidak lama, jabatan tersebut memberi saya pemaknaan yang luar biasa untuk dapat menyeimbangkan otak kanan dan kiri dalam bekerja.

Pengalaman itu sangat berkesan baginya. Dari situ, ia memahami bahwa membangun hubungan kemitraan adalah hal yang penting. Ia pun berusaha untuk mengembangkan ekosistem pembelajaran digital di Pusdiklat Keuangan Umum. Hal ini dilakukan sebagai upaya untuk mengedepankan koneksi dan interaksi dengan *stakeholders* secara digital.

Berbicara mengenai waktu luang, ibu dari Nidaa Az Zahra ini lebih suka menghabiskan waktunya untuk membaca. Ia juga memiliki hobi memotret obyek yang menurutnya menarik ketika sedang bepergian ke suatu tempat. “Hobi lain saya itu mengejar *sunrise* ataupun *sunset* baik di *rooftop* maupun di pantai,” ujarnya.

Waktu libur juga selalu dimanfaatkan untuk bisa berkumpul bersama keluarga. “Saya dan suami kebetulan sama-sama ASN di Kemenkeu sehingga jam kerjanya sama. Jadi, Sabtu dan Minggu adalah hari di mana kami bisa menghabiskan waktu bersama. Saat ini, anak kami juga sedang berkuliah di Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Gajah Mada dan tinggal bersama Eyang Putrinya. Minimal sebulan sekali kami pergi ke Yogyakarta untuk melepas rindu pada mereka,” ujarnya.

Harapan bagi diri dan institusi

Dalam hidup tentu saja ada harapan yang ingin diraih. Begitu pula dengan Heni. Sebagai pribadi, ia berharap dirinya dapat menjadi individu yang lebih baik. “Saya ingin menjadi orang yang lebih baik dan lebih berguna, lebih bisa memanfaatkan kesempatan yang diberikan Allah SWT menuju tercapainya *wellbeing* utk diri saya dan keluarga,” katanya.

Sementara itu, harapannya untuk organisasi adalah ia berharap Pusdiklat Keuangan Umum dan BPPK dapat memiliki peran penting dan memberikan kontribusi positif bagi Kemenkeu dalam upaya meningkatkan kapasitas SDM yang semakin berkualitas.

“Harapannya dapat menjadi institusi pengelola kapasitas SDM yang kredibel dan dipercaya tidak saja di Kemenkeu tapi dalam lingkup nasional dan internasional dan tentunya semakin berjaya dengan Kemenkeu Corpu dan *modern e-learning* yang dimilikinya,” pungkasnya.

Teks Dara Haspramudilla

Bangun GRC, Cegah Korupsi

M. Rahman Ritza,
Widyaiswara Utama pada Pusdiklat
KeuanganUmum, BPPK

Sejumlah operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan KPK terkait kasus korupsi pada sejumlah instansi sudah semestinya membuat para pimpinan instansi lebih mawas diri. Penting bagi para pimpinan untuk menggiatkan pengawasan di instansinya masing-masing guna mencegah terjadinya tindak pidana korupsi. Terlebih bila tindak korupsi terjadi di suatu instansi pemerintah. Hal ini akan berdampak buruk bagi kegiatan pelayanan, citra, hingga kinerja instansi tersebut.

Sebagai informasi, perlu diketahui apa yang sebenarnya terjadi kala pegawai suatu instansi kedapatan melakukan korupsi. Diketahui dari berita di media massa, setelah OTT diumumkan oleh KPK, biasanya jajaran pimpinan instansi menyampaikan *press release* yang menyatakan bahwa mereka akan bersikap kooperatif, menghormati proses hukum, serta mendukung upaya pemberantasan korupsi yang dilakukan. Meski disampaikan dalam waktu singkat, penyusunan *press release* faktanya cukup menyita waktu dan tenaga karena perlu dilakukan sesegera mungkin.

Beberapa hal yang dilakukan instansi yang pegawainya tertangkap tangan oleh KPK antara lain, mencari kepastian informasi terkait adanya OTT, memahami modus pelanggaran yang dilakukan pegawai, mengetahui lokasi

penahanan, hingga memperoleh informasi terkait barang bukti yang disita. Sebaik apapun *press release* yang dilakukan, kenyataan adanya tindak pidana korupsi di instansi tersebut telah menorehkan citra negatif bagi publik. Itu sebabnya, upaya pencegahan terjadinya tindak pidana korupsi perlu dilakukan dengan sebaik mungkin.

Modus pegawai melakukan korupsi

Sebagai pimpinan instansi penting untuk memahami penyebab terjadinya korupsi dan penerapan *governance, risk, and control* (GRC). Ada beberapa teori atau konsep yang digunakan untuk menjelaskan faktor-faktor penyebab seseorang melakukan korupsi. Misalnya, konsep *fraud triangle* dari Donald R. Cressey yang menjelaskan penyebab terjadinya korupsi. Yaitu adanya *pressure, opportunity*, dan *rationalization*. Konsep ini kemudian berkembang menjadi konsep *fraud pentagon* dengan bertambahnya elemen *capability* dan *arrogance*. Selain itu, ada juga yang menggunakan teori GONE dari Jack Bologne. Dia menjelaskan korupsi terjadi karena faktor *greedy, opportunity, need*, dan *exposure*.

Greedy atau serakah menurut KBBI adalah sifat yang selalu hendak memiliki lebih, dari yang sudah dimiliki. Orang yang mempunyai sifat ini akan selalu berusaha melakukan tindakan yang paling menguntungkan dirinya sendiri tanpa menghiraukan kepentingan orang lain. Mereka akan menciptakan kesempatan untuk korupsi bahkan dengan melanggar aturan. Tujuan utamanya adalah untuk menambah kepemilikan pribadinya, baik dalam bentuk harta, kekuasaan, atau pengaruh. Penyebab korupsi dari aspek ini sangat sulit diberantas karena menyangkut perubahan sifat manusia yang sudah tertanam. Pada aspek *opportunity* atau kesempatan, pelaku korupsi akan melakukan aksi karena adanya kelemahan sistem dan/atau praktik yang berlaku.

Ilustrasi
A. Wirananda

Pengelolaan risiko secara sederhana dapat disimpulkan sebagai kerangka kerja untuk menduga adanya hambatan-hambatan baru yang akan mengganggu pencapaian tujuan instansi

Pelaku bisa saja tidak mempunyai keinginan untuk korupsi, tetapi karena adanya kelemahan pada sistem, mendorong mereka untuk melakukannya. Salah satu contoh korupsi pada aspek ini adalah penggunaan setoran kas pelanggan secara sedikit demi sedikit oleh pegawai yang bertugas melakukan pencatatan setoran sekaligus mengelola rekening bank.

Untuk aspek *needs* atau kebutuhan, pelaku melakukan korupsi karena dorongan kebutuhan. Umumnya hal ini berkaitan dengan keperluan mendesak, seperti biaya sekolah anak, biaya pengobatan orang tua, atau pelunasan utang bank. Untuk memenuhi kebutuhan mendesak ini, pelaku akan mencari-cari kelemahan sistem yang ada, atau bahkan akan melanggar aturan agar kebutuhannya dapat dipenuhi. Terakhir, aspek *exposure* atau pengungkapan. Berdasarkan aspek ini, pelaku akan melakukan korupsi karena berpandangan bahwa akibat atau konsekuensi dari tindakannya dapat ditanganinya. Pelaku dengan alasan ini biasanya adalah orang-orang yang mempunyai pengaruh dalam lingkup kerjanya.

Penerapan GRC di lingkungan instansi

Terkait dengan kerangka kerja GRC, sesuai The Institute of Internal Auditors, *governance* atau tata kelola dapat diartikan sebagai suatu proses yang dilakukan oleh pimpinan dalam memberikan otorisasi, arahan, dan pengawasan kepada manajemen di bawahnya guna pencapaian tujuan instansi. *Governance* menangani dua area besar, yaitu terkait penyediaan arahan strategis dan kegiatan pengawasan terhadap pelaksanaan tata kelola instansi. Pada yang pertama, pimpinan bertanggung jawab untuk menyediakan arahan strategis dan petunjuk pelaksanaan pencapaian tujuan instansi yang konsisten dengan tugas dan fungsi instansi. Sementara untuk yang kedua, pimpinan instansi bertanggung jawab dalam mengarahkan manajemen, memberikan otorisasi untuk bertindak, serta mengawasi seluruh hasil pekerjaan.

Untuk pengelolaan *risk* (risiko) di instansi pemerintah, prinsip-prinsip pelaksanaannya tersedia dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 60 Tahun 2008 tentang Sistem

Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP). Pengelolaan risiko secara sederhana dapat disimpulkan sebagai kerangka kerja untuk menduga adanya hambatan-hambatan baru yang akan mengganggu pencapaian tujuan instansi, sekaligus membuatkan tools atau tindakan yang diperlukan untuk pencegahannya (mitigasi). Setelah tools untuk mitigasi tersebut dibuat, akan menjadi tools pengendalian jika diterapkan dalam sistem yang ada. Dengan demikian, pengelolaan risiko berorientasi ke depan dengan menemukan tools pengendalian baru. Sementara pengendalian (*control*) intern berorientasi pada pencegahan terjadinya hambatan-hambatan rutin yang sudah dikenali dari praktik-praktik proses bisnis sebelumnya.

Membangun lingkungan pengendalian instansi

PP Nomor 60 Tahun 2008 mengadopsi kerangka kerja pengendalian intern dari COSO yang berisi 6 unsur Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP). Keenam unsur tersebut, yaitu lingkungan pengendalian, penilaian risiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi, serta pemantauan. Jika diperhatikan penjelasan detilnya, unsur pertama berkaitan dengan upaya membangun budaya manusia, sedangkan keempat unsur lainnya berkaitan dengan pembangunan sistem kerja. Penerapan unsur yang pertama yaitu lingkungan pengendalian merupakan yang terpenting, karena bertujuan untuk mewujudkan kondisi lingkungan

kerja yang dapat memotivasi pegawai untuk berperilaku positif terhadap sistem pengendalian yang ada. Tools manajemen utama yang harus tersedia dan digunakan antara lain yang terkait dengan cara membangun dan memelihara integritas serta nilai etika instansi, komitmen terhadap kompetensi di semua lini, kebijakan sumber daya manusia yang sehat, hingga unit pengawasan yang efektif. Unsur merupakan dasar fundamental dari pelaksanaan SPIP dan dapat mempengaruhi tools yang akan digunakan pada keempat unsur lain.

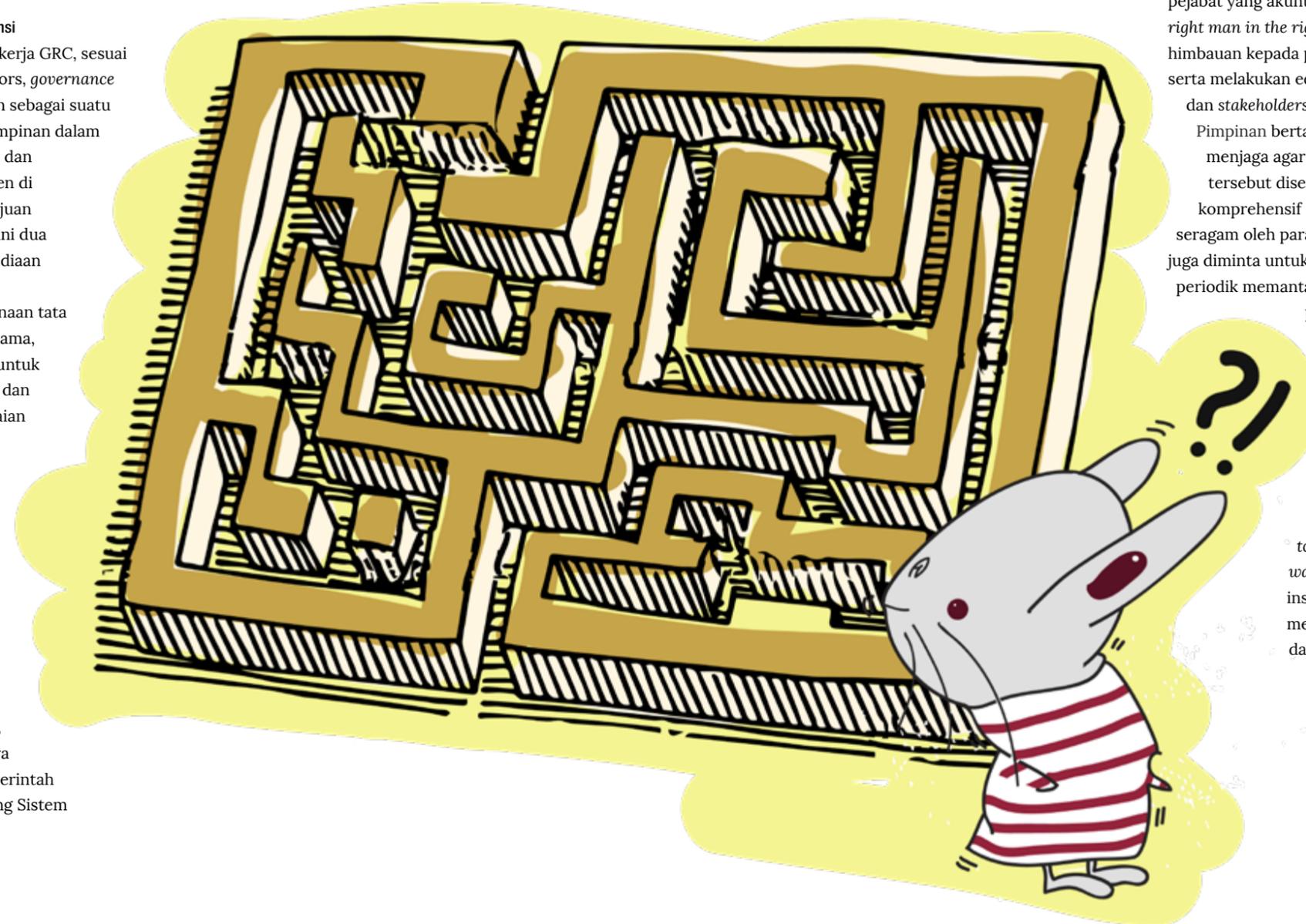
Pada unsur lingkungan pengendalian, pimpinan harus membangun nilai budaya instansi, menyusun kode etik dan kode perilaku pegawai, menempatkan pejabat yang akuntabel sesuai prinsip *right man in the right place*, melakukan himbuan kepada para *stakeholders*, serta melakukan edukasi kepada pegawai dan *stakeholders* agar berintegritas.

Pimpinan bertanggung jawab untuk menjaga agar implementasi nilai-nilai tersebut diselenggarakan secara komprehensif dan dipahami secara seragam oleh para pegawai. Pimpinan juga diminta untuk secara sistematis dan periodik memantau perilaku-perilaku

pegawai agar senantiasa mencerminkan nilai-nilai yang sudah disepakati. Satu hal penting yang juga harus dilakukan adalah menerapkan konsep *tone at the top and walk the talk*. Pimpinan instansi sejatinya mampu menunjukkan manifestasi dari nilai-nilai tersebut

dan tentu saja menjadi teladan bagi seluruh pegawai. Upaya penyampaian nilai-nilai dan perilaku antikorupsi juga dilakukan secara cerdas agar sesuai dengan kondisi pegawai yang dihadapi. Di era milenial sekarang, metode *classical* dalam meng-edukasi relatif akan sulit mencapai sasaran, karenanya adaptasi dengan konteks yang ada saat ini perlu sangat dilakukan. Isu milenial atau generasi Y, *platform social media* yang sedang *hype*, dan *influencers* adalah *keywords* yang harus digunakan agar metode edukasi yang dilakukan setidaknya memicu *awareness target audience*. Metode lain yang lebih pas di era sekarang adalah *focused group discussion* (FGD) dimana diselenggarakan dengan mengundang tidak hanya peserta internal, tetapi juga mengundang celebrities yang sedang menjadi idola pegawai sehingga pesan-pesan yang akan disampaikan akan mendapat lebih perhatian.

Dari uraian teori GONE dan kerangka kerja GRC di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa korupsi dan pencegahannya pasti melibatkan faktor manusia dan sistem. Oleh karena itu, semua upaya pencegahannya harus berorientasi pada kedua hal tersebut. Apabila unsur-unsur yang dipersyaratkan dalam kerangka kerja GRC terpenuhi, terutama terkait penerapan lingkungan pengendalian dan dipadukan dengan kesadaran mengenai penyebab korupsi pada teori GONE, dapat dipastikan baik langsung maupun tidak langsung motivasi dan kesempatan untuk melakukan korupsi dapat dikurangi. Dengan demikian, kemungkinan terjadinya tindak korupsi dapat diminimalkan, sehingga tidak akan mengganggu pencapaian tujuan instansi.



Ilustrasi
A Wirananda x
Dimach Putra

Manuver Kebijakan Pajak

Milson Febriyadi,
Badan Kebijakan Fiskal



Dengan porsi yang saat ini telah melampaui 80 persen pendapatan negara, peran penerimaan perpajakan tidak hanya akan mempengaruhi seberapa banyak jumlah program dan proyek pembangunan yang bisa dialokasikan setiap tahun, tetapi juga menentukan proses pembangunan bangsa (*state building*) dari tahun ke tahun.

Dalam jangka pendek, langkah kebijakan di sektor penerimaan pajak dihadapkan pada tantangan untuk menanggulangi dampak penurunan volume perdagangan global dan melemahnya harga komoditas perdagangan. Di dalam negeri, langkah mitigasi penerimaan juga menghadapi tantangan berupa prospek pertumbuhan ekonomi domestik yang sering kali mengalami koreksi negatif. Masalah ini kian kompleks karena pada saat yang bersamaan, otoritas fiskal harus memikirkan ulang opsi perluasan basis penerimaan pajak untuk tidak begitu membebani potensi pertumbuhan ke depan. Terlebih, struktur pertumbuhan ekonomi kita sangat bertumpu pada sisi konsumsi masyarakat dan prospek kenaikan tingkat investasi yang kadang kala justru diasosiasikan dengan tersedianya dukungan insentif perpajakan.

Lantas, apakah diskusi tentang pencarian sumber penerimaan pajak menjadi tidak relevan di tengah situasi pencarian sumber pertumbuhan baru? Saya tak pandai benar menjawabnya. Yang jelas, untuk bertahan di tengah tekanan tersebut, rasanya kita perlu mencontoh strategi bertahan hidup di pulau terpencil

seperti yang dilakukan tokoh Chuck Noland dalam film *Cast Away* (2000) yang diperankan secara impresif oleh aktor kenamaan Tom Hanks. Prinsipnya: ia mengumpulkan apa saja yang bisa digunakan untuk bertahan hidup secara stabil di tengah gejolak cuaca dan iklim yang tidak bersahabat. Ini mengajarkan nilai keberanian mengalahkan rasa takut. Dalam realitasnya, pelaku kebijakan perlu percaya diri menghadapi dinamika ketidakpastian dan dengan cermat menghitung setiap kemungkinan yang dapat menjadi dasar pengambilan keputusan secara kredibel.

Perluasan basis pajak menjadi sebuah keniscayaan manakala pelaku kebijakan dihadapkan pada arah kebijakan anggaran yang bersifat ekspansif dalam rangka menstimulasi perekonomian dan akselerasi pencapaian target pembangunan secara terarah dan terukur. Terlebih, pelaku kebijakan senantiasa menghadapi tema persoalan pembangunan

yang berbeda dari tahun ke tahun.

Untuk tahun 2020 misalnya, tema kebijakan anggaran mengarah pada fase penguatan fondasi daya saing sebagai pijakan bagi pelaksanaan pembangunan pada fase transisi memperkuat daya saing dan lepas landas menuju negara maju pada periode 2036-2045. Di sini, daya saing yang kuat sesungguhnya ditopang oleh kualitas sumber daya manusia yang tangguh dan kemampuan untuk melakukan inovasi secara berkesinambungan. Ketangguhan tersebut pada gilirannya diperoleh dari hasil belajar bersinergi dengan pihak lain dan pengalaman berkompetisi, bukan diperoleh dari suatu kebijakan proteksi yang tidak jelas batasannya. Oleh karena itu, dalam konteks upaya membangun kebijakan penerimaan pajak yang ampuh, belanja perpajakan harus dikelola secara hati-hati untuk meningkatkan daya saing dan menumbuhkan investasi domestik secara terarah. Tidak bisa kemudian semua sektor ataupun lini bisnis menjadi pionir yang diprioritaskan untuk memperoleh perlindungan.

Ekosistem kepatuhan

Pertukaran data informasi secara otomatis menjadi relevan dalam rangka membuka ruang basis pajak sekaligus meningkatkan kepatuhan dengan skema pencegahan. Australia memiliki contoh yang baik dalam hal ini. Otoritas pajak di sana mengedepankan upaya pencegahan (*prevention*) daripada mengobati (*cure*) suatu tindakan kecurangan. Di sini,

pembenahan format pelaporan dalam formulir SPT dipelajari seperti survei yang akan terhubung secara sistematis dengan desain mitigasi risiko kecurangan maupun



perubahan kebijakan ke depan. Otoritas menyadari betapa terbatasnya sumber daya yang dimiliki untuk bisa melakukan audit. Maka, strategi yang dipakai adalah dengan membenahi sistem yang dapat memberikan pendampingan bagi wajib pajak untuk bisa patuh secara sukarela.

Di tengah perubahan proses bisnis global yang memungkinkan siklus produksi menjadi lebih singkat karena pengaruh kekuatan teknologi, kebijakan perpajakan juga perlu disiapkan dengan mendasarkan pada prinsip kesepadanan bagi semua pelaku usaha (*level playing field*) baik untuk pelaku usaha konvensional maupun *e-commerce*. Artinya, jika ada dua pelaku usaha dengan kemampuan membayar (*ability to pay*) yang sama, sudah sewajarnya mereka memiliki kewajiban pajak yang sama. Hanya saja memang, konsep kesepadanan tersebut bukan satu-satunya tolok ukur yang harus dipenuhi sepenuhnya manakala otoritas perpajakan memiliki objektif lain dari suatu kebijakan. Ini karena pajak tidak hanya menjalankan fungsi mobilisasi pendapatan, ia juga punya fungsi turunan untuk mengoreksi kegagalan pasar, meredistribusi kesejahteraan, ataupun mendorong *infant industry* untuk dapat memiliki daya saing.

Konsep omnibus

Salah satu pesan penting dari rencana kerja pemerintah untuk meningkatkan daya saing adalah dengan simplifikasi regulasi dan mengurangi hambatan birokrasi. Pesan tersebut diterjemahkan melalui skema simplifikasi perumusan ketentuan peraturan dalam konsep *omnibus law*. Secara singkat, konsep ini mirip *strike* dalam permainan bola gelinding (*bowling*). Dalam permainan tersebut, nilai tertinggi didapatkan manakala satu lemparan dapat menjatuhkan seluruh sasaran.

Dalam realitasnya, pelaku kebijakan

memilih untuk memusatkan perhatian pada poin-poin pengaturan strategis yang sebelumnya berasal dari dua atau lebih regulasi untuk selanjutnya dapat diintegrasikan ke dalam satu regulasi tunggal. Misalnya saja, otoritas perpajakan cukup fokus pada konsep pengaturan berbagai tarif pajak, insentif, ataupun perlakuan bagi subjek pajak tertentu. Apresiasi akan diperoleh manakala regulasi tersebut dapat memberikan pengaruh positif bagi mobilisasi penerimaan secara lebih efisien dan meningkatkan partisipasi sektor swasta terhadap pertumbuhan ekonomi nasional lewat jalur investasi sektor riil.

Dengan berevolusinya proses produksi yang kian terfragmentasi dan tidak terbatas pada satu kawasan saja (*cross-border*), regulasi perpajakan yang dikemas dalam konsep *omnibus law* dapat menjembatani perubahan pola bisnis yang terjadi secara masif dalam waktu singkat. Ini menegaskan bahwa pelaku kebijakan memang dituntut untuk bisa luwes di era disrupsi seperti sekarang. Mereka tidak bisa lagi berlama-lama menyusun sebuah kebijakan dengan metode pengambilan keputusan yang bersumber pada data *ex-post* dari masa lalu. Alih-alih, pendekatan *headline matching* yang mengedepankan analisis suatu kecenderungan dari sumber-sumber berita utama baik cetak dan daring kini menjadi pilihan alternatif karena lebih bersifat *real time*.

*Tulisan ini merupakan pandangan pribadi penulis dan tidak mewakili pandangan/perspektif institusi tempat penulis bekerja.



Kantor Pelayanan Kekayaan
Negara dan Lelang Singkawang

Mengabdikan dari Batas Negeri

Gegap gempita peringatan Hari Oeang Republik Indonesia (HORI) selalu dinanti seluruh pegawai di lingkungan Kementerian Keuangan. Banyak acara diselenggarakan dalam merayakan hari bersejarah keuangan nasional tersebut. Selain bersifat menghibur, beberapa acara juga mengapresiasi kinerja pegawai dan kantor yang berprestasi. Pada peringatan ke-73 ini, Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Singkawang berhasil menyabet gelar Kantor Pelayanan Terbaik di Lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN). Predikat tersebut menjadi legitimasi kerja keras seluruh jajaran KPKNL Singkawang selama ini untuk bertransformasi dan berinovasi memberi pelayanan terbaik bagi para pengguna jasa.

Untuk meraih prestasi bergengsi dan membanggakan ini, seluruh pegawai di KPKNL Singkawang telah berusaha dengan keras. Kantor yang berada di kota paling toleran di Indonesia ini memiliki 21 pegawai, terdiri dari kepala kantor, enam kepala seksi/subbagian, satu pejabat fungsional pelelang muda, 13 pelaksana dan satu pegawai tugas

belajar. Terbatasnya jumlah pegawai tak membatasi optimalisasi pelayanan yang diberikan kepada 140 satuan kerja (Satker) yang tersebar dari Singkawang hingga wilayah utara Kalimantan Barat yang berbatasan langsung dengan Malaysia. Tantangan tersebut jelas dirasakan oleh Tetik Fajar Ruwandari, Kepala KPKNL Singkawang. Wanita kelahiran Gunung Kidul ini baru enam bulan diberi amanah memimpin kantor tersebut. Dalam waktu singkat ia bersama tim KPKNL Singkawang berhasil menyamakan langkah dan menorehkan prestasi membanggakan tersebut, meski harus melalui banyak tantangan.

Akselerasi penyesuaian diri

Tantangan pertama berasal dari seberapa cepat ia bisa menyesuaikan diri. Belum genap setengah tahun wanita yang akrab dipanggil Tetik ini mendapat mandat untuk menjadi kepala kantor di sini. Masa kepemimpinannya dimulai saat proses pemilihan kantor pelayanan terbaik tengah berlangsung. "Saya masuk Juni, sedangkan proses seleksi dimulai di Bulan Maret," ceritanya.

Tetik bersyukur karena dia masuk di saat perbaikan fisik sarana dan prasarana telah rampung dikerjakan. Namun, yang harus dihadapinya adalah reformasi non fisik dengan memanfaatkan SDM yang dimiliki. "Begitu SK untuk memimpin teman-teman di Singkawang turun, saya *nggak* buang waktu, harus segera mengenal tim saya," tuturnya. Ia pun lalu menambahkan, "Bagaimana saya bisa minta tolong bikin ini itu, kalau saya *nggak* kenal mereka, tahu kebutuhan dan mereka maunya *gimana?*".

Proses pengenalan diri pun bergulir dengan natural. Sebagai



Gedung KPKNL
Singkawang

Tetik Fajar Ruwandari,
Kepala KPKNL
Singkawang

SERASI, Selasa
Inspirasi menjadi
salah satu cara
seluruh jajaran KPKNL
bertukar informasi dan
inspirasi.

Optimalisasi layanan
kepada pengguna
layanan dan
stakeholders

Foto
Resha Aditya P.

Foto
Dok. KPKNL
Singkawang



kepala kantor, ia memosisikan diri sebagai pemimpin yang luwes dan santai. Karena citra tersebut, para staf pun bisa lebih nyaman dan terbuka padanya. Namun di sisi lain, ia harus juga mampu menjadi teladan bagi timnya. Sehingga, tercipta rasa risih dan segan jika tak melakukan kebiasaan yang telah ia contohkan. "Mulai dari hal sepele seperti memungut sampah yang tergeletak, harus dibiasakan dulu," pesannya.

Pangkas birokrasi berbelit

Natur dari sebuah kantor pelayanan adalah berorientasi pada ketepatan pemberian layanan dan kepuasan dari pengguna layanan. Hal itu pula yang menjadi fokus utama dari inovasi yang dihadirkan oleh tim di KPKNL Singkawang. Tantangannya lebih kepada memadatkan proses bisnis dengan SDM yang cukup terbatas namun harus melayani Satker yang cukup banyak yang mencakup sebaran wilayah yang luas.

Untuk memberikan pelayanan yang optimal, KPKNL Singkawang berhasil merumuskan budaya kerja yang disebut TIDAYU (terencana, ikhlas, disiplin, akuntabel, yakin dan unggul). Formula tersebut dirasa sudah pas sebagai pedoman bagi para pegawai dalam memberikan layanan yang lebih efektif dan efisien. Beberapa layanan yang berhasil dipangkas waktu pelayanannya adalah penetapan status penggunaan barang milik negara (BMN), penjualan BMN dan penetapan jadwal lelang.

Komitmen tersebut menghasilkan layanan yang tak hanya



lebih cepat, tapi juga dapat langsung dirasakan oleh para *stakeholder*. Sebuah inovasi sederhana memang, tapi mampu berdampak nyata terhadap peningkatan tingkat kepuasan pengguna layanan. Terlebih, kantor pemerintahan memiliki *image* tersendiri terkait rumitnya birokrasi. Hal itu berhasil ditepis oleh tim KPKNL Singkawang.

Tetik juga selalu mengingatkan tentang pentingnya memberikan pelayanan dari hati. Menurutnya, cara tersebut dapat menunjukkan ketulusan pelayanan yang diberikan para abdi negara, bahkan bagi mereka yang berada di batas negeri sekalipun. "KPKNL ini kan wajahnya DJKN, terlebih juga Kementerian Keuangan, jadi kita harus tulus memberikan yang terbaik," tukasnya.

Masa depan pelayanan

Meski telah diganjar dengan prestasi tertinggi di bidang pelayanan, KPKNL Singkawang tak berhenti terus memberi yang lebih baik lagi. Tetik menyadari betul tantangan yang dihadapi bersama dengan tim yang dipimpinnya. Tuntutan kemajuan zaman membuat pelayanan mulai mengalami pergeseran. Dari pelayanan langsung tatap muka, kini hadir lewat *platform* digital. Bahkan kini lelang, salah satu layanan utama DJKN, telah dilaksanakan secara daring (*e-auction*).

Untuk menjawab tantangan zaman tersebut, KPKNL Singkawang pun telah menyiapkan beberapa inovasi berbasis teknologi informasi. Salah satu unggulannya adalah SIAPPLE yang merupakan *database* pelaksanaan lelang, baik yang akan maupun telah dilaksanakan. Sedangkan, untuk memudahkan pelaksanaan pelayanan secara *real time*, KPKNL Singkawang menghadirkan SIAPIN (Sistem Aplikasi Pelayanan Informasi). Dengan hadirnya inovasi tersebut dapat lebih mudah dan cepat mendapatkan pelayanan.

Meski tidak gagap dalam memanfaatkan perkembangan teknologi, KPKNL Singkawang tidak ingin latah dalam menyambut era digital. Wilayah kerjanya yang luas dengan karakteristik daerah perbatasan dengan segala keterbatasan adalah tantangan yang harus mampu dihadapi. Menyadari hal tersebut, seluruh pegawai di KPKNL Singkawang selalu siap menjalankan peran mereka memberi pelayanan langsung dan asistensi kepada para pengguna jasa. Agar efektif, mereka aktif mengingatkan pengguna jasa untuk mengirim kelengkapan dokumen agar dapat diverifikasi sebelum datang ke kantor pelayanan untuk proses finalisasi.

"Kami ingin menunjukkan bahwa teman-teman yang mengabdikan di batas negeri ini tetap mampu berinovasi di tengah segala keterbatasan, sekaligus menjadi wajah dan perpanjangan tangan bagi instansi tempat kami mengabdikan," tutup Tetik penuh semangat.

Teks Dimach Putra



Bermula Malu Berujung Ulung

*Irfan Bayu Pradhana,
Fotografer Kementerian Keuangan*

Nasib orang siapa yang tahu. Tak ada yang mampu menerka peruntungan siapa pun. Termasuk Irfan Bayu Pradhana, lelaki kelahiran Purbalingga yang sehari-hari bertugas mengabadikan kegiatan Menteri Keuangan (Menkeu). Setelah menuntaskan pendidikan di jurusan Kebendaharaaan Negara, Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (STAN), Bayu tak pernah terpikir bahwa angin akan membawa nasibnya menjadi fotografer. Dalam benaknya saat itu, kelak ia akan berkutut dengan perkara keuangan negara. Saat penempatan lulusan, Irfan Bayu Pradhana ditempatkan pada Biro Komunikasi dan Layanan Informasi, Sekretariat Jenderal.



Irfan Bayu Pradhana, Fotografer Kementerian Keuangan

Bayu pada sesi foto Menteri Keuangan

Foto
Dok. Biro KLI/
Faiz

Perihal hijrah

Tak ada yang mudah perkara hijrah. Lelaki yang sepanjang tiga tahun bergumul dengan angka-angka ini mesti hijrah menggeluti lensa, cahaya, dan membidik momen-momen berharga. Keraguan, tentu jadi bagian tak terpisahkan dari hijrah macam ini. “Saya bahkan tak pernah mengulik kamera sebelumnya,” ia melanjutkan, “lalu selama tiga hari penuh saya diminta mengulik dan mempelajari kamera, setelahnya langsung ditugaskan meliput (kegiatan Menkeu).” Semula ia masih didampingi oleh fotografer senior dalam liputan. Perlahan-lahan, seiring perkembangan, ia mulai dipercayai untuk bertugas sendiri.

Pantang lekas puas, Bayu sehari-hari sibuk mengembangkan kompetensi ihwal fotografi. Melalui diskusi dengan senior, artikel fotografer profesional, dan aneka rupa lokakarya, ia terus memperluas wawasan. “Wah, dulu foto belum tahu apa-apa. Pokoknya jelek banget,” katanya sambil tersenyum menceritakan pengalamannya.

Sebagai fotografer Menkeu, selain mesti menguasai perkara fotografi, Bayu juga mesti siap didapuk kapan saja ke mana saja. Tak jarang ia menuntaskan malam dalam penugasan alih-alih pulang dan berbagi kasih dengan istri dan anaknya. “Pernah juga sampai rumah jam dua

malam,” katanya mengisahkan pengalaman saat mengikuti kegiatan Menkeu di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Akhir pekan baginya tak selalu berarti kesempatan sebesar-besarnya untuk keluarga. Sekali waktu, ia mesti hadir juga dalam penugasan pada akhir pekan. Makan siang di kota yang satu dan makan malam di kota lainnya juga tentu harus dilakoninya. “Memang tugasnya begitu, ya dijalani,” katanya. Kendati seolah demikian padat penugasan yang mesti dijalani, bapak satu anak ini mengaku menikmati pekerjaannya. Ia mensyukuri tugasnya untuk selalu siaga dan siap membidik momen-momen berharga. “Senang bisa mengikuti dari dekat kegiatan orang paling penting di Kemenkeu,” ujarnya.

Berkat nasihat sejawat

Salah satu momen yang selalu dikenangnya adalah saat ia dipercaya menjadi fotografer dalam sesi foto Menkeu Sri Mulyani Indrawati. Ia mengaku senang dengan kesempatan istimewa itu. “Senang. Dari semula tidak tahu apa-apa, sampai dipercaya *handle* sesi foto Ibu (Menkeu),” katanya. Kesempatan itu tak luput dibangun seorang diri. Ia mengaku bisa percaya diri menggarap sesi foto Menteri berkat dukungan dari sejawatnya. Menurutnya, apa yang ia nikmati saat

ini tak luput dari pengaruh fotografer senior, baik yang masih menjadi fotografer ataupun yang telah beralih tugas. “Beruntung ada fotografer-fotografer senior yang dulu telaten mengajari saya,” ia melanjutkan, “itu sangat membantu saya menyesuaikan diri.”

Meskipun tampak sarat pengalaman menyenangkan, bukan berarti pekerjaannya ia lalui tanpa konsekuensi. Ia mesti rela merentang jarak dan memangkas waktu dengan anak-istrinya.

Kendati mengaku begitu menikmati pekerjaannya saat ini sebagai fotografer Menkeu, ia tahu bahwa ia tak bisa terus menerus dengan pekerjaan yang sama sepanjang karir. Rotasi pegawai dan perpindahan tugas adalah keniscayaan yang dihadapi semua pegawai, termasuk Bayu. Kelak saat tak lagi bertugas sebagai fotografer, ia berharap dapat mengimplementasikan pendidikannya seputar pengelolaan keuangan negara. Ia juga berharap untuk terus dapat kesempatan mengembangkan kemampuan fotografinya. Bayu telah jatuh cinta pada pekerjaannya. Dan, sebagaimana umumnya jatuh cinta, setiap kepala ingin selalu sibuk meniti waktu bersama-sama.

Teks A. Wirananda

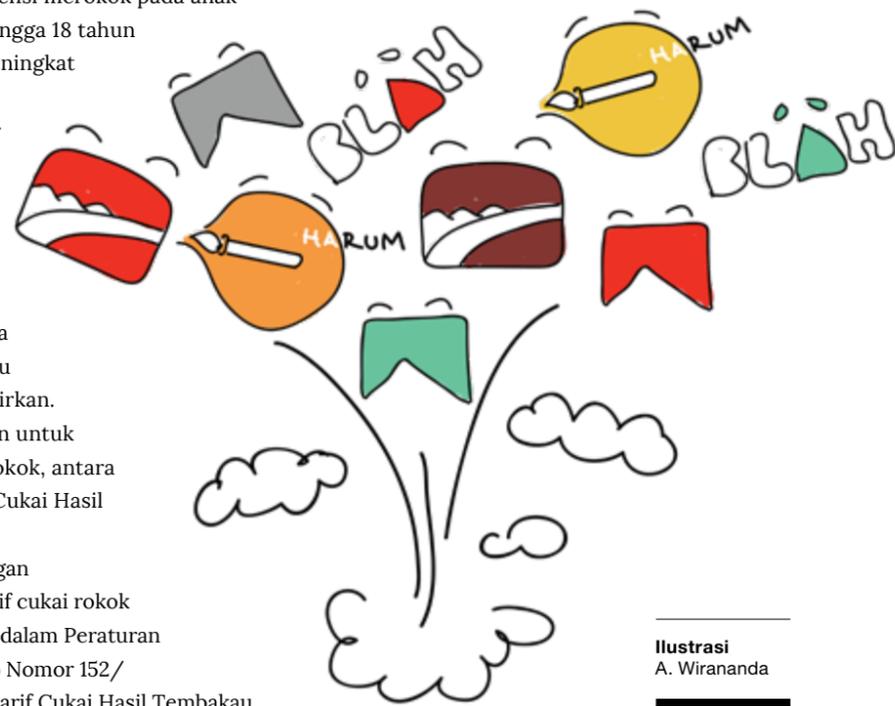
Wujudkan SDM Unggul, Tarif Cukai Hasil Tembakau Naik

Riviu Peraturan Menteri Keuangan Nomor 152/PMK.010/2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 146/PMK.010/2017 Tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau

Jumlah perokok usia belia di Indonesia terus meningkat dari tahun ke tahun. Berdasarkan Hasil Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) 2018 yang dilakukan Kementerian Kesehatan, prevalensi merokok pada anak yang berusia 10 hingga 18 tahun

mencapai 9,1 persen, meningkat dibandingkan survei di tahun 2013 yaitu sebesar 7,9 persen. Jika populasi pada kelompok usia itu sekitar 40,6 juta jiwa, maka sudah ada sekitar 3,9 juta anak yang merokok. Banyaknya usia belia yang merokok tentu saja sangat mengkhawatirkan. Berbagai upaya dilakukan untuk mengurangi konsumsi rokok, antara lain dengan menaikkan Cukai Hasil Tembakau (CHT).

Kementerian Keuangan mengeluarkan aturan tarif cukai rokok yang baru yang tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 152/PMK.010/2019 tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau.



Ilustrasi
A. Wirananda

PMK yang ditandatangani Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati berlaku sejak diundangkan yakni pada 18 Oktober 2019. Adapun batasan harga jual eceran per batang atau gram dan tarif cukai per batang atau gram hasil tembakau buatan dalam negeri maupu yang diimpor, akan diberlakukan pada 1 Januari 2020. Terbitnya PMK ini merupakan langkah pemerintah untuk menekan konsumsi rokok sekaligus salah satu sumber penerimaan negara. Diterbitkannya PMK Nomor 152 mengubah aturan yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 146/PMK.010/2017 tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1485) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 156/PMK.010/2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 146/PMK.010/2017 tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau.

Tarif naik 23 persen

Dalam PMK Nomor 152, rerata tertimbang kenaikan tarif cukai rokok tahun depan sebesar 23 persen untuk sigaret kretek mesin (SKM), sigaret putih mesin (SPM) dan sigaret kretek tangan (SKT). Dengan kenaikan CHT ini, harga jual eceran (HJE) naik sebesar 35 persen. Kenaikan tarif untuk sigaret kretek mesin (SKM) golongan I yang akan berlaku mulai 2020 sebesar Rp740 atau naik 25,4 persen dari tarif tahun lalu sebesar Rp590, lalu sigaret putih mesin (SPM) untuk golongan I menjadi Rp790 atau naik 26,4 persen dari Rp625, sedangkan untuk sigaret kretek tangan (SKT), kenaikan SKT golongan I mencapai 16,4 persen per batang.

Dari tarif cukai tiga jenis rokok itu, terdapat 10 golongan tarif sesuai kapasitas produksi industri. Produsen

rokok SKM yang memproduksi lebih dari 3 miliar batang per tahun dimasukkan ke golongan I dengan tarif cukai sebesar Rp740 per batang. Sementara, industri yang memproduksi rokok di bawah 3 miliar batang per tahun dibedakan menjadi dua, yakni II A dan II B dengan kewajiban tarif cukai yang lebih murah, masing-masing Rp470 per batang dan Rp455 per batang. Pada rokok SPM, perusahaan yang memproduksi 3 miliar batang per tahun juga masuk golongan I dengan tarif cukai Rp790 per batang. Industri yang kapasitasnya di bawah 3 miliar juga dibagi menjadi II A dan II B dengan tarif cukai masing-masing Rp485 per batang dan Rp470 per batang. Adapun untuk rokok SKT, industri yang kapasitas produksinya lebih dari 2 miliar batang per tahun dikenakan cukai Rp425 per batang. Industri dengan kapasitas antara 500 juta - 2 miliar batang cukainya sebesar Rp330 per batang. Selanjutnya, produsen SKT dengan kapasitas produksi 10 juta - 500 juta batang terkena cukai Rp200 per batang. Terakhir, produsen yang hanya memproduksi rokok kurang dari 10 juta per tahun dikenakan tarif cukai Rp110 per batang.

Dalam menetapkan besaran kenaikan tarif, pemerintah mempertimbangkan berbagai aspek. Aspek utama adalah pengendalian konsumsi rokok. Diharapkan kenaikan CHT ini dapat mengurangi konsumsi rokok dan dapat mengurangi prevalensi usia muda untuk merokok. Selain itu, kenaikan tarif ini juga mempertimbangkan tingkat komponen dalam negeri (TKDN). Sebagai konsekuensi, dari data di atas terlihat bahwa yang banyak terkena kenaikan tarif tinggi adalah rokok yang masuk dalam golongan atau layer atas. Aspek selanjutnya adalah jumlah produksi

pabrikasi. Semakin banyak kapasitas produksi, kenaikan cukai semakin besar. Dengan mempertimbangkan jumlah produksi dan pangsa pasar, jenis produk tembakau iris, rokok daun, sigaret kelembek kemenyan, dan cerutu tidak dikenakan kenaikan tarif CHT. Aspek selanjutnya adalah target penerimaan cukai tahun depan cukup tinggi, yang mencapai Rp180 triliun. Angka ini naik sekitar 9 persen dibanding outlook penerimaan cukai pada akhir tahun 2019.

Penutup

Pemerintah Indonesia berupaya melindungi warganya khususnya generasi muda dari jerat asap rokok dengan meningkatkan cukai hasil tembakau. Agar tidak beralih ke sarana lain yang juga berdampak negatif bagi kesehatan, pemerintah juga akan menaikkan cukai vape yang diperkirakan akan naik sebesar 25 persen dari harga yang berlaku sekarang. Saat ini, tarif cukai cairan vape dikenakan sebesar 57 persen dari harga jualnya. Di masyarakat banyak yang beranggapan bahwa penggunaan vape lebih aman daripada rokok konvensional. Namun demikian, beberapa hasil riset menyatakan bahwa konsumsi vape berbahaya bagi kesehatan. Saat ini Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) tengah mengupayakan ekstensifikasi cukai terhadap barang-barang yang menghasilkan karbondioksida dan berpengaruh buruk terhadap kesehatan, termasuk vape. Dengan kebijakan kenaikan cukai hasil tembakau dan VAPE, diharapkan kualitas hidup masyarakat dapat meningkat dengan berkurangnya konsumsi dan peredarannya di masyarakat.

Teks Budi Sulistyono



Dedi Cahyadi saat dinobatkan menjadi Wirusaha Mandiri 2019.

Foto dok. Pribadi

Pindah dari Kediri ke Kabupaten Lumajang, membawa Dedi Cahyadi remaja pada kebiasaan baru: mengamati geliat sektor pertanian dan perikanan di kotanya. Sudah jadi rahasia umum, kekayaan alam di Kabupaten Lumajang, terutama pada bidang pertanian dan perikanan, memang berlimpah. Sembari menyaksikan potensi ekonomi di kotanya, Dedi yang kala itu masih duduk di bangku sekolah menengah atas bertanya-tanya. Hal apa yang bisa menjadikan kedua sektor unggulan tadi berkembang lebih pesat serta bernilai tambah? “Jawabannya adalah teknologi,” pikir Dedi menjawab kegundahannya sendiri.

Kini Dedi boleh berbangga, impiannya untuk bisa memberikan nilai tambah bagi sektor riil khususnya perikanan,

betul-betul ia wujudkan. Bersama dengan timnya, Dedi memperkenalkan *nanobubble technology*. Sebuah terobosan yang mampu mengatasi permasalahan pada kualitas air dan budidaya sektor perikanan di Indonesia. Melalui perusahaan rintisan yang ia bangun, *nanobubble technology* telah dirasakan manfaatnya oleh peternak udang di enam kota di Indonesia. “Kami berharap, dengan hadirnya teknologi kami di Indonesia, maka petani dan udang bisa menjadi lebih bahagia,” ungkap dedi seraya tergelak.

Lompatan

Sentuhan teknologi diyakini Dedi bisa memberikan banyak manfaat. Efisiensi proses, inovasi produk, hingga nilai tambah pada komoditas, bisa diperoleh dengan memanfaatkan kebaikan teknologi.

“Misalnya saja teknologi pembenihan pada pertanian dan perikanan, proses budidaya dan panen, hingga penyimpanan hasil panen,” sebutnya memberi contoh. Berdasarkan keyakinan itulah, Dedi makin terpacu untuk menekuni bidang terkait lebih dalam lagi.

Maka tak heran, memasuki pendidikan sarjana, Dedi begitu termotivasi mengambil bidang teknologi pertanian di Universitas Brawijaya. Saat itu, ia bahkan telah mematok target untuk bisa meneruskan pendidikan master di Jerman. Salah satu cara yang ia tempuh ialah dengan mengikuti seleksi beasiswa di Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP).

Lulus sarjana, Dedi mengumpulkan bekal guna memenuhi syarat-syarat beasiswa. Fokusnya terutama pada

Hilirisasi Teknologi Hadirkan Solusi



Gedung Danadyaksa Cikini
Jl. Cikini Raya no. 91 A-D Menteng
Telp/Faks. (021) 3846474
E-mail. lpd@depkeu.go.id
Twitter/Instagram. @LPDP_RI
Facebook. LPDP Kementerian Keuangan RI
Youtube. Lembaga Pengelola Dana Pendidikan LPDP RI

peningkatan kemampuan berbahasa. Sebagai modal kursus, sejumlah pekerjaan pun dia lakoni. Mulai dari tenaga pengajar, *freelance trainer*, hingga pembicara di beberapa kampus di Malang. Saat dirasa cukup, Dedi mengambil kursus Bahasa Inggris selama satu bulan, seraya mengikuti tes TOEFL ITP di kota Pare, Kediri. “Hasilnya, *alhamdulillah* cukup untuk mengikuti seleksi beasiswa LPDP Dalam Negeri,” kenang Dedi.

Meski masih menyisakan keinginan belajar ke negeri Jerman, Dedi perlu mengubah rencananya. “Melihat kondisi bekal keuangan untuk kursus bahasa yang sudah tidak ada, ibu sampai tertimpa musibah kecelakaan di saat saya sibuk menyiapkan prasyarat beasiswa di Malang, hingga tenggat waktu pendaftaran beasiswa LPDP yang semakin sempit,” akunya. Setelah berdiskusi dengan salah satu staf dosen di kampusnya, Dedi memantapkan langkah untuk mengambil Program Studi Teknik Lingkungan di Institut Teknik Bandung. Beruntung, Dedi lulus seleksi beasiswa, sehingga biaya selama menempuh pendidikan disokong sepenuhnya oleh LPDP.

Pertemuan

Tuhan tak pernah salah menggariskan ketentuan-Nya pada hidup tiap manusia. Keinginan Dedi yang sempat terpendam untuk belajar di negeri Jerman akhirnya terjawab. Pada semester keempat perkuliahan, Dedi berkesempatan menimba ilmu ke negeri Jerman. “Saya bersama empat kawan dari ITB lolos pada Program *Summer School and Research Exchange* terkait pengelolaan air di Universitas Duisburg Essen Germany, selama kurang lebih satu bulan,” ceritanya dengan haru.

Tak hanya itu, semasa menjalani masa perkuliahan pascasarjana, Dedi juga berkenalan dengan bisnis teknologi yang kelak mengubah jalan hidupnya. Kala itu, ekosistem perusahaan rintisan (*startup*) tengah tumbuh subur di Bandung. Begitupun minat Dedi untuk mengenal

bisnis teknologi. Dedi lalu mengubah fokusnya sebagai *social entrepreneur* maupun *technological entrepreneur*, yaitu bisnis teknologi yang bisa menyelesaikan permasalahan lingkungan dan berdampak pada kesejahteraan masyarakat.

Bagi Dedi, kolaborasi antara para peneliti dengan pemuda-pemudi yang memiliki semangat *entrepreneur* bisa jadi solusi dalam mengatasi beragam masalah di Indonesia. “(Misalnya saja), konsep bisnis yang sedang saya jalani saat ini. Kami berfokus menghubungkan para pakar teknologi dari beberapa instansi dengan latar belakang keahlian yang sesuai untuk menyelesaikan masalah dan mengkomersialisasi hasil riset teknologi, sehingga mampu diterima pasar,” jelas Dedi panjang lebar.

Perusahaan rintisannya, PT. Nanobubble Karya Indonesia (Nanobubble.id), merupakan hasil kolaborasi Dedi dengan salah seorang *awardee* LPDP lainnya, Hardi Junaedi. Diceritakan Dedi, mereka beberapa kali bertemu di sejumlah *startup competition*. Lalu, ide untuk menghilirisasi teknologi *nanobubble* muncul setelah keduanya bergabung dengan Komunitas Masyarakat Nano Indonesia, sebuah inkubator bisnis Nano Center Indonesia yang berlokasi di Tangerang Selatan.

“Saya mengingat saat (belajar) di Jerman, ada suatu teknologi Nanobubble untuk remediasi sungai dan danau. Beruntung, tepat di LIPI, Profesor Nurul yang juga pembina Inkubator Nano Center Indonesia, telah melakukan riset nanobubble sejak 2014,” ungkapnya. Maka selanjutnya Dedi dan Hardi bertindak sebagai eksekutor sekaligus *co-founder*. Sementara seorang *awardee* lain, Wendy Tri Prabowo berperan sebagai peneliti bersama Profesor Nurul Taufiq Rochman. “Para peneliti ini senantiasa menyempurnakan teknologi yang kita jual atau sewakan ke masyarakat pengguna,” jelasnya.

Selain berorientasi bisnis, Nanobubble.id juga bekerjasama dengan sejumlah

instansi dalam dan luar negeri untuk mengembangkan *social entrepreneur*. “Kami membina dan membuat tambak-tambak udang berukuran kecil (*small scale pond*), tapi memiliki produktivitas panen yang tinggi di masyarakat,” katanya. Konsep ini dikembangkan melalui bantuan yang bersumber dari dana CSR, *grant* dalam dan luar negeri, hingga para investor dengan konsep bagi hasil. Nantinya Dedi berharap, penetrasi teknologi bukan hanya pada sektor perikanan, melainkan juga sektor pengolahan limbah cair, pengelolaan air sungai dan danau, hingga pertanian hidroponik.

Beasiswa jadi jalan

Apa yang dicapai Dedi kini, salah satunya karena beroleh kesempatan melanjutkan pendidikan tinggi. “Pendidikan memang bukan segala-galanya. Namun segala-galanya tidak akan mampu diraih maksimal, kecuali dengan pendidikan yang baik,” tuturnya. Itu sebabnya, Dedi mendorong generasi muda untuk mengambil kesempatan dan memaksimalkan jenjang pendidikan yang dimiliki. Tidak terbatas pada lembaga pendidikan formal, tetapi juga lembaga nonformal. “Di situ juga terdapat kesempatan bagi kita menemukan partner untuk berkarya dan berkontribusi lebih kepada negara,” ungkapnya.

Berbicara tentang strategi menembus beasiswa LPDP, Dedi menyebutkan ada tiga hal penting. Pertama, menjaga *track record* akademik dan IPK. Kedua, memiliki kemampuan *soft skill*. Ketiga, memiliki karya ilmiah, seperti PKM, LKTI, hingga publikasi ilmiah. Berkesempatan memperoleh beasiswa LPDP begitu disyukuri Dedi. Selain mampu mengakomodasi semua kebutuhan studi para *awardee*, LPDP dinilai kaya akan jejaring komunitas alumni serta *stakeholders*. “Terutama untuk berkolaborasi dalam suatu proyek bermanfaat yang bersifat masif,” tutupnya.

Teks Farida Rosadi



PELANGGARAN UNDANG-UNDANG CUKAI



LAPORKAN PEREDARAN ROKOK ILEGAL
KE KANTOR BEA CUKAI TERDEKAT
ATAU HUBUNGI NOMOR **1500 225**

Bugar

Jangan Remehkan Stunting

Nur Wahyu Nugroho

Stunting masih menjadi permasalahan serius bagi bangsa Indonesia yang harus segera dicarikan jalan keluarnya. Menurut *World Health Organization (WHO)*, *stunting* didefinisikan sebagai kondisi gagal tumbuh pada anak balita karena kekurangan gizi kronis sehingga anak terlalu pendek pada usianya. Standar yang dipakai sebagai acuan adalah kurva pertumbuhan yang dibuat oleh WHO.

Dilansir dari *website* Kementerian Kesehatan, bahwa berdasarkan hasil dari Survei Status Gizi Balita Indonesia (SSBGI) tahun 2019 yang dilakukan oleh Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan Kemenkes bekerjasama dengan Badan Pusat Statistik menunjukkan telah terjadi penurunan prevalensi *stunting* dari 30,8 persen tahun 2018 (Risksdas 2018) menjadi 27,67 persen tahun 2019. Namun, hal ini harus tetap menjadi perhatian serius bagi Pemerintah, karena WHO membatasi masalah *stunting* di setiap negara, provinsi, dan kabupaten adalah sebesar 20 persen.

Stunting sangat berkaitan dengan perilaku masyarakat dan pola asuh. *Stunting* berarti adanya gangguan pertumbuhan fisik dan pertumbuhan otak pada anak. Anak *stunting* dapat terjadi dalam 1000 hari pertama kelahiran dan dipengaruhi oleh banyak faktor, di antaranya sosial ekonomi, asupan makanan, infeksi, status gizi ibu, penyakit menular, kekurangan mikronutrien, dan lingkungan.

Disamping itu, menurut data yang dikeluarkan oleh *World Bank* (2014), *stunting* dan kekurangan gizi lainnya, disamping berisiko pada hambatan pertumbuhan fisik dan kerentanan anak terhadap penyakit, juga menyebabkan hambatan perkembangan kognitif yang akan berpengaruh pada tingkat kecerdasan dan produktivitas anak di masa depan. Pada akhirnya *stunting* dan masalah gizi lain diperkirakan menurunkan produk domestik bruto (PDB) sekitar 3 persen per tahun.

Lantas, langkah-langkah apa saja yang perlu kita lakukan untuk mencegah timbulnya *stunting* pada anak-anak di lingkungan kita? Dilansir dari *Warta Kesmas* Kementerian Kesehatan, pencegahan *stunting* bisa dilakukan dengan berbagai cara diantaranya adalah: memenuhi kebutuhan gizi anak yang sesuai pada 1000 hari pertama kehidupan anak; pemenuhan kebutuhan asupan nutrisi bagi ibu hamil; konsumsi

protein pada menu harian untuk balita usia di atas 6 bulan dengan kadar protein sesuai dengan usianya; serta menjaga kebersihan sanitasi dan memenuhi kebutuhan air bersih.

Salah satu upaya untuk mencegah terjadinya *stunting* yang tidak kalah penting adalah dengan rutin membawa anak-anak kita untuk mengikuti program Posyandu minimal satu bulan sekali. Anak-anak usia balita akan ditimbang dan diukur berat badan serta tingginya sehingga akan diketahui secara rutin apakah balita tersebut mengalami *stunting* atau tidak.

Generasi penerus bangsa harus terbentuk secara sehat, cerdas, kreatif, dan produktif. Jika anak-anak terlahir sehat, tumbuh dengan baik dan didukung oleh pendidikan yang berkualitas maka mereka akan menjadi generasi yang menunjang kesuksesan pembangunan bangsa.

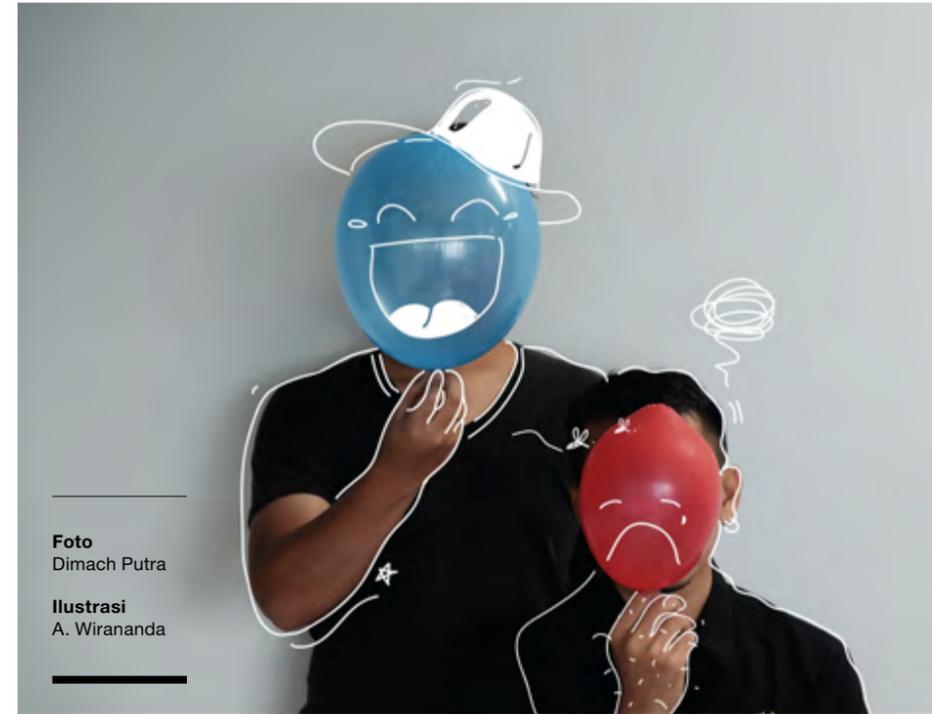


Foto
Dimach Putra

Ilustrasi
A. Wirananda

Belajar ke Seoul

Foto
Resha Aditya
Pratama

Seorang CEO hotel prestisius di New York pergi ke Seoul, Korea Selatan, dua kali dalam setahun. Ia menginap di hotel yang sama dalam dua kesempatan itu. CEO terkesan dengan sikap pegawai hotel itu yang mengucapkan, "Selamat datang, Pak! Senang bertemu Anda kembali."

Sepulangnya dari Korea Selatan, ia segera berkonsultasi dengan para ahli. Mereka merekomendasikan kepada CEO untuk memasang kamera-kamera dengan peranti lunak pengenalan wajah (*face recognition*). Kamera itu akan memotret wajah tamu dan memberi tahu resepsionis apabila tamu yang datang itu pernah menginap di sana sebelumnya.

Sayangnya sistem itu memakan biaya jutaan dolar Amerika Serikat. Tak sanggup membayangkan jumlah uang yang dikeluarkannya, CEO pergi kembali ke Seoul dan dengan malu-malu menanyakan secara langsung kepada resepsionis hotel untuk mendapatkan jawaban cara kerja sistem pengenalan tamu.

Jawabannya sederhana saja. Pihak hotel membayar supir taksi untuk mengorek informasi dari tamu yang akan

menginap di hotel itu. Jadi, di sepanjang perjalanan menuju hotel, supir taksi akan berbincang-bincang dengan tamu dan mengajukan pertanyaan penting apakah mereka pernah menginap di hotel itu sebelumnya.

Kalau tamu belum pernah sama sekali menginap, maka supir taksi akan memberi kode kepada resepsionis dengan cara menaruh bagasi tamu di samping kiri meja resepsionis. Kalau sudah pernah, maka supir taksi menaruh bagasi di sebelah kanan meja. Sederhana dan murah.

Drew Boyd dan Jacob Goldenberg menulis cerita menarik itu dalam buku berjudul *Inside the Box*. Buku ini menyajikan fakta keunggulan berpikir di dalam kotak untuk berinovasi, bukan di luar kotak, apalagi dengan *brainstorming*.

Buku lain menceritakan tentang keunggulan berpikir simpel dalam versi berbeda. NASA mengeluarkan biaya mahal untuk mendapatkan pulpen yang bisa digunakan di pesawat atau stasiun luar angkasa. Pulpen itu harus bisa berfungsi pada gravitasi lemah. Pulpen yang tidak terpengaruh dengan gaya gravitasi.

Lalu dalam cerita tersebut

mengemuka pertanyaan tentang mengapa harus berpikir rumit begitu? Mengapa tidak memakai pensil saja? Sesederhana itu. Namun, ternyata penggunaan pensil di luar angkasa memiliki risiko besar. Argumentasi penolakan penggunaan pensil sudah bertebaran di internet.

Salah satunya ada dalam film *3 Idiots* yang dirilis 10 tahun lalu pada 2009. Ketika sang direktur sekolah tinggi bernama Viru Sahastrebudde mengatakan kepada mahasiswanya bernama Rancho, jika ujung pensil yang digunakan di luar angkasa itu pecah, maka pecahan itu akan mengapung dalam gravitasi nol, masuk ke mata, hidung, dan menyebar ke mana-mana. Yang paling parah jika pecahan itu merusak instrumen vital pesawat luar angkasa. Artinya, pensil bukan solusi sederhana dan kesederhanaan tidak selalu memberikan jawaban.

Maka, benarlah apa yang disampaikan Albert Einstein: "Buat semuanya sesederhana mungkin, tetapi jangan terlalu sederhana."

Teks Riza Almanfaluthi

Asah Kreativitas dengan Mengelola Rutinitas

Apakah yang Anda lakukan ketika memulai pagi Anda? Apakah mengecek pesan yang masuk di *smartphone* dan kemudian membalasnya? Atau mengecek media sosial dan kemudian mengetik komentar pada unggahan teman Anda? Apakah Anda merasa waktu berlalu begitu cepat sementara Anda merasa belum melakukan apa-apa?

Pertanyaan-pertanyaan di atas adalah beberapa masalah yang sering dialami kebanyakan orang akhir-akhir ini. Dunia yang berkembang dengan sangat cepat telah membawa tantangan-tantangan baru dalam kehidupan manusia. Perkembangan teknologi saat ini membuat arus informasi mengalir deras dan konektivitas yang hampir tak terbatas. Kita sudah tidak lagi bisa sepenuhnya 'menyendiri' di dunia ini. Permasalahan berikutnya adalah begitu sulit untuk menjadi kreatif di tengah 'gangguan-gangguan' ini. Kalimat "Kami sudah terlalu sibuk dengan urusan sehari-hari sehingga tidak sempat menindaklanjuti ide/hal baru" akan menjadi hal yang terlalu klise untuk didengar.

Salah satu gangguan terbesar yang kita hadapi saat ini adalah 'alur kerja reaksioner'. Seringkali kita menggunakan waktu untuk kegiatan yang sifatnya reaktif dengan merespon hal-hal terkini, seperti membalas surel, chat, atau twit. Mengalokasikan sebagian besar waktu untuk melakukan

pekerjaan kreatif terlebih dahulu, baru kemudian melakukan pekerjaan reaktif akan membantu kita kembali pada prioritas yang lebih penting bagi kita

Buku *Manage Day-To-Day* hadir untuk menawarkan sejumlah pemikiran penting dalam mengoptimalkan ritme rutinitas harian Anda. Buku ini merupakan kumpulan tulisan pengalaman dan pemikiran pemimpin dan pelaku kreatif dunia yang membahas mengenai empat keterampilan penting yang harus dikuasai untuk meraih kesuksesan, yaitu kemampuan untuk mengembangkan rutinitas harian, menentukan fokus di dunia yang penuh gangguan, mengontrol penggunaan perangkat teknologi, dan mengasah pikiran kreatif.

Dibandingkan buku-buku bertemakan pengembangan diri lainnya, buku ini termasuk buku yang cukup ringan untuk dibaca. Menyinggung permasalahan terkini dalam kehidupan keseharian kita dan menawarkan alternatif solusinya, membuat buku ini menarik untuk dibaca. Alur pembahasan yang runut disertai dengan intisari pada tiap babnya menjadikan pembaca dapat memahami isi buku dengan mudah.

Mungkin ide dan solusi yang ditawarkan oleh buku ini belum tentu cocok untuk semua orang, namun setidaknya membaca buku ini akan menambah insight dari rutinitas yang seringkali melenakan kita.

Peresensi Reny Henriyani



Judul:
Manage Your Day-To-Day, Kembangkan Rutinitas, Kontrol Teknologi, Tentukan Fokus, & Asah Kreativitas

Penulis / Penerjemah:
Jocelyn K. Glei / Mursid Wijanarko

Tahun Terbit:
2016

Dimensi:
233 Halaman

Kunjungi Perpustakaan
Kementerian Keuangan
dan Jejaring Sosial Kami:
Gedung Djuanda I Lantai 2
Jl. Dr. Wahidin Raya No. 1
Jakarta Pusat



5 Buku Pilihan Perpustakaan Kemenkeu:

- 1 [Belahan Jantungku](#)
Andien Aisyah
- 2 [Nanti Kita Cerita Tentang Hari Ini](#)
Marchella FP
- 3 [Homo Deus Masa Depan Umat Manusia](#)
Yuval Noah Harari
- 4 [Meniti Bianglala](#)
Mitch Albom
- 5 [Si Anak Badai](#)
Tere Liye

Wisata Naik Tangga di Ngarai Sianok

Teks dan Foto Sanda Aditiya



Ngarai Sianok telah lama dikenal sebagai primadona wisata Sumatera Barat. Di jurang sepanjang 15 kilometer di perbatasan Kabupaten Agam dan Kota Bukittinggi ini tersebar banyak objek wisata yang sangat menarik untuk dijelajahi. Sebagian besar membutuhkan jalan kaki untuk mengeksplorasinya lebih jauh.

Sebelum memulai berkelana di Ngarai Sianok yang menguras fisik, ada baiknya kita mengisi perut terlebih dahulu. Tempat bagus untuk memulai aktivitas di Bukittinggi adalah Jam Gadang, termasuk untuk menyarap. Nasi padang

RM Simpang Raya sama terkenalnya dengan Jam Gadang di depannya. Kita bisa menikmati rendang, salah satu makanan terenak di dunia, seraya memandangi lalu lalang pengunjung ikon Bukittinggi tersebut dari lantai 2 RM Simpang Raya.

Setelah kenyang, kita melakukan pemanasan dengan menyusuri tempat menarik di sekitar Jam Gadang. Dimulai dari Taman Monumen Bung Hatta, Masjid Raya Bukittinggi, Kebun Binatang Kinantan, menyeberang melalui Janjang Pesanggrahan, dan terakhir berswafoto dengan latar Jembatan Limpapeh.

Di dasar Ngarai Sianok sedalam 100 meter, terdapat aliran Batang (Sungai)

Sianok. Dahulu kala, penduduk sekitar membuat janjang (tangga) dari bambu dan batu untuk mengambil air dan pasir dari aliran sungai tersebut. Saat ini, beberapa janjang telah direnovasi dan dijadikan alternatif tempat wisata menarik oleh pemerintah. Salah satunya, Janjang Saribu (Tangga Seribu). Pintu masuk atasnya terletak di samping halaman Masjid Baiturrahman, Bukit Apit.

Jumlah anak tangganya memang tidak sampai seribu, tetapi cukup banyak untuk dihitung. Beberapa anak tangga memiliki kemiringan curam. Namun, anak tangga itu sudah memiliki pegangan kokoh di sepanjang jalur. Dari puncak,

terlihat pemandangan tiga gunung yang mengelilingi Ngarai Sianok. Orang-orang sering menyebutnya Tri Arga yang terdiri atas Gunung Marapi (2.891 mdpl), Gunung Singgalang (2.877 mdpl), dan Gunung Tandikat (2.438 mdpl).

Di tengah tangga, terdapat pos peristirahatan. Terpampang hamparan hijau Ngarai Sianok yang memanjakan mata. Sementara itu, di dasar tangga, tampak aliran Batang Sianok beserta sawah dan kerbau di pinggirannya.

Berlanjut ke Janjang Koto Gadang yang pembatas pagarnya bergerigi kotak-kotak sehingga banyak orang menyebutnya sebagai “Tembok Besar China”-nya

Bukittinggi. Tempat ini terletak di Koto Gadang, Kecamatan IV Koto, Agam. Banyak orang menyamakan janjang ini dengan Janjang Saribu, padahal keduanya terletak di tempat berbeda. Keduanya memang sama-sama menempel di pinggir Ngarai Sianok, serta memiliki pemandangan yang melenakan mata dan pikiran.

Janjang Saribu didominasi bebatuan, sedangkan Janjang Koto Gadang lebih rimbun pepohonan dan dijumpai banyak monyet di sepanjang jalurnya. Janjang Koto Gadang lebih lebar sehingga tidak perlu takut bila berpapasan dengan orang lain di tengah jalur.

Sekitar 50 meter menjelang dasar

Ngarai, terdapat jembatan gantung yang menghubungkan kedua sisi Batang Sianok. Kita bisa menemukan pintu lain di sisi Kota Bukittinggi. Jika sudah kehabisan energi untuk kembali naik ke Koto Gadang, ada jasa ojek baik *offline* maupun *online*. Atau jika masih bersemangat, jelajahi objek wisata lainnya yang terletak dekat dari pintu masuk sisi Bukittinggi seperti Lobang Jepang.

Setelah kelana Janjang di Ngarai Sianok, mungkin asam laktat akan banyak terakumulasi di betis dan paha dalam beberapa hari ke depan. Namun, stok memori indah Ngarai Sianok takkan habis dalam waktu lama.

Bisnis Bareng Teman

“Kak Kartes, aku ada masalah nih! Jadi begini, aku ada bisnis bersama teman lama, di bidang ayam potong. Nah aku udah kirim barang, nilainya sekitar Rp 90 juta. Eh masa, udah dua bulan ini gak dibayar. Kan jadinya aku gak bisa ambil lagi di supplier utama. Alhasil bulan ini aku gak jualan. Rugi banyak nih!”

Andhika Diskartes,
founder diskartes.com,
penulis buku *Investory*
dan buku *Investory “X”*

Kisah seperti ini nyata adanya. Kejadian seperti ini jamak terjadi di Indonesia. Ditambah lagi kultur kita yang “enggan” untuk memitigasi risiko dan menagih jika ada *problem*. Saya sendiri pernah berbisnis bersama teman. Ada yang lancar ada pula yang macet. Sebenarnya lumrah, karena memang demikianlah siklus usaha.

Lalu, apakah kita harus berhenti bisnis bersama teman? No. Saya sangat mendukung Anda untuk mulai menjalankan bisnis bersama teman. Kenapa? Karena pada hakekatnya Anda sudah paham karakter rekan Anda. Kalau kita berbicara risiko, berbisnis bersama orang yang tidak dikenal jauh lebih berbahaya. Lantas poin-poin apa saja yang perlu Anda perhatikan untuk mengurangi risiko yang terjadi?

Pertama, persiapkan perjanjian kerjasama, bukan sekedar MoU. Ternyata perjanjian kerjasama antara kedua belah pihak memiliki kekuatan hukum yang lebih kuat bila dibandingkan MoU. MoU bisa dibilang sebagai nota kesepahaman yang menggambarkan garis besar tanggung jawab masing-masing pihak. Isinya terbatas pada pokok-pokok pekerjaan yang harus dilaksanakan. Sedangkan Perjanjian Kerjasama atau yang biasa disebut sebagai MoA (*Memorandum of Agreement*), memiliki isi yang jauh lebih rinci, mulai dari pekerjaan, biaya, sanksi, dan lain sebagainya.

Poin kedua adalah negosiasi harga. Dalam setiap kesempatan bertemu klien atau *partner*, apa yang selalu mereka minta pertama kali? Harga yang murah! Pada momen itulah negosiasi bisnis terjadi,

dan yang selalu saya tekankan di awal adalah harga atau porsi kepemilikan saya adalah XXX rupiah. Ingat kawan, yang dibeli oleh *partner* Anda bukan hanya tenaga, keahlian, dan uang, tetapi juga waktu. Memang terkesan tidak elok, tetapi untuk menghindari permasalahan yang terjadi di kemudian hari, pastikan bahwa kepentingan-kepentingan Anda dijamin dengan layak.

Ketiga adalah siapkan proses bisnis yang 99 persen bisa dilaksanakan. Definisikan kemungkinan permasalahan di masa depan, dan *straight to the point* pada solusi di awal pembentukan bisnis Anda. Saran saya hindari berpikir, “Yang penting dilakuin aja deh, nanti juga kita bisa temukan solusinya.” Tuh banyak *startup* yang sukses, padahal *gak pake planning*.” Betul ada banyak bisnis *startup* sukses, tetapi yang perlu diingat adalah banyak juga *startup* yang hancur lebur karena tidak memakai perencanaan yang matang. Jika Anda siap berjalan tanpa rencana, maka Anda juga harus siap untuk membakar investasi Anda.

Tips terakhir adalah *depends on your style*. Tips ini belum tentu cocok diterapkan untuk semua. Namun, sudah bukan zamannya lagi Anda harus bekerja serius di tempat yang serius. Apa yang terjadi jika kita melakukan *meeting* yang butuh pemikiran inovatif, tetapi dilakukan di tempat yang “angker”? Selesai sih, tetapi Anda akan bosan. Sesekali cobalah lakukan *business meeting* ke cafe yang suasananya lebih rileks. Anda, *partner*, maupun klien Anda bisa bahagia bersama-sama dan *meeting* pun menjadi lebih produktif.

Mas Praim



“TEMAN YANG SELALU ADA”

Cerita : Yani Kurnia A.

Gambar : Bimo Adi





MEMPERINGATI HARI IBU
22 DESEMBER 2019

Foto:
Anas Nur Huda



KEMENTERIAN KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA